

**LAPORAN PENELITIAN**

**PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI  
DANA PNBP TAHUN ANGGARAN 2012**



**IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA PADA MASYARAKAT  
LOKAL DALAM PERSPEKTIF INTEGRASI NASIONAL  
STUDI DI KOTA GORONTALO**

**Dr. Udin Hamim, S.Pd, SH, MSi**

**Dr. Sastro M. Wantu, SH, M.Si**

**JURUSAN ILMU HUKUM DAN KEMASYARAKATAN  
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN  
KEWARGANEGARAAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO  
OKTOBER 2012**

## ABSTRAKSI

Implementasi nilai-nilai Pancasila pada masyarakat lokal dalam perspektif integrasi nasional merupakan suatu mekanisme yang efektif untuk menciptakan kepribadian dan jatidiri masyarakat Gorontalo berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Tujuan penelitian ini adalah menjawab pertanyaan tentang: (1). Bagaimana implementasi nilai-nilai Pancasila pada masyarakat lokal dalam perspektif integrasi nasional di Kota Gorontalo? Dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kondisi tersebut? (2). Bagaimana model rekomendasi tentang implementasi nilai-nilai Pancasila pada Masyarakat lokal yang sesuai dengan dimensi integrasi nasional di Kota Gorontalo

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan menelusuri atau meneliti berbagai fenomena yang berkaitan dengan berbagai implementasi nilai-nilai Pancasila pada masyarakat lokal dengan menggunakan instrumen penelitian yang didasarkan pada data, fakta dan konsep-konsep yang relevan. Dengan penelitian tersebut diharapkan dapat mengurai implementasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi dan sekaligus juga merekonstruksi model implementasi nilai-nilai Pancasila pada masyarakat lokal yang sesuai dengan dimensi integrasi nasional dalam masyarakat yang diwarnai oleh pluralisme di daerah. Penelitian ini menginginkan suatu model masyarakat daerah yang melaksanakan kepribadian dan memiliki jatidiri yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang mengagungkan Bhinneka Tunggal Ika.

**Kata Kunci:** Implementasi Pancasila, masyarakat lokal, integrasi nasional.

## LEMBAR PENGESAHAN

---

- 1. Judul** : Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Pada Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Integrasi Nasional Studi Di Kota Gorontalo
- 2. Pelaksana** :
- a). Nama : Dr. Udin Hamim, SP.d, SH, M.Si
  - b). Jenis Kelamin : Laki-Laki
  - c). NIP : 197608142002121001
  - d). Jabatan Struktural : Direktur PKM
  - e). Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
  - f). Fakultas/Jurusan : Ilmu Sosial/Ilmu Hukum Dan Kemasyarakatan
  - g). Pusat Penelitian : Lemlit UNG
  - h). Alamat : JL. Jenderal Sudirman No. 06 Kota Gorontalo
  - i). Telpon/Faks/E-mail : udinhamim@yahoo.co.id
  - j). Alamat Rumah : JL. Jakarta Perumahan Graha Wiyani Lestari Blok G No. 02 Kelurahan Dulalowo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo
  - k). Telpon : 082190043891
- 4. Jangka Waktu Penelitian** : 6 (enam) bulan
- 5. Pembiayaan** :
- Jumlah Biaya Yang Diajukan : Rp. 17.000.000

Mengetahui

Gorontalo, 15 Oktober 2012

Dekan FIS

Penyusun

**Moh. R. Puluhulawa, SH, M.Hum**  
**NIP. 197011051997031001**

**Dr. Udin Hamim, S.Pd.,M.Si**  
**NIP. 197608142002121001**

Menyetujui  
Ketua Lembaga Penelitian

**Dr. Fitryane Lihawa, M. SI**  
**NIP.19691209 199303 2 001**

## KATA PENGANTAR

Pertama-tama saya ingin memanjatkan ”*Alhamdulillahillahirabbil alamin*” sebagai tanda syukur yang tiada taranya kehadiran Allah SWT atas segala karunia yang telah diberikan kepada saya, baik itu berupa nikmat iman, rezeki, kesehatan, ilmu dan kemudahan lainnya sehingga penelitian yang berjudul *Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Pada Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Integrasi Nasional Studi Di Kota Gorontalo*” dapat diselesaikan dengan baik.

Penelitian ini merupakan tahapan yang membicarakan salah satu pilar kebangsaan Pancasila sebagai ideologi dalam berbagai bidang kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat yang dipandang perlu diimplementasikan dalam masyarakat terutama di tingkat lokal. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi diharapkan dapat merangsang pengembangan sebuah pemikiran yang dipraktekkan dalam berbagai bidang kehidupan yang tujuan utamanya antara lain untuk menjaga integrasi bangsa.

Kemudian pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah berperan penting dalam keseluruhan proses penelitian baik itu masyarakat, pemerintah kota Gorontalo maupun kalangan ilmuan di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo. Pertama-tama, secara khusus saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga disertai rasa hormat saya kepada wali kota Gorontalo Adhan Dambea, Ssos, MA, Kepala Kesbangpol Arifin Muhammad dan stafnya, yang telah memberikan izin dan ruang penelitian, Kepala Lemlit dan sekretarisnya yaitu ibu Dr Fitri Lihawa, Msi dan Dr Harto Malik MSi yang memberi kesempatan kepada peneliti untuk melakukan penelitian ini. Selanjutnya ucapan terimakasih saya haturkan kepada yang terhormat Bapak Dekan dan ketua Jurusan Ilmu Hukum Dan kemasyarakatan Fakultas Ilmu Sosial Bapak Mohammad Rusdianto Puluhulawa, SH,M.H, dan Ibu Asmun Wantu SPd, MSc, yang penuh ketulusan memberikan

dorongan dan kesempatan kepada peneliti untuk terlibat dalam berbagai penelitian dan pengabdian masyarakat.

Akhir kata, penulis sadar bahwa karya penelitian ini masih tergolong hijau karena banyak kekurangan dan keterbatasan, oleh karena itu saya sangat terbuka terhadap berbagai masukan, kritik dan saran yang konstruktif dalam meningkatkan kualitas penelitian ini, sehingga bermanfaat bagi pengembangan wacana akademik yang bisa membuka uara pemikiran dan dorongan untuk bersikap kritis terhadap fenomena sosial.

Peneliti

Dr. Udin Hamim, SPd, SH, MSi

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAKSI</b> .....	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar belakang Masalah .....	1
1.2 Fokus Masalah .....	2
1.3 Perumusan Masalah .....	3
1.4 Tujuan Penelitian .....	3
1.5 Manfaat Penelitian .....	4
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
2.1 Integrasi Nasional.....	7
2.2 Etnisitas Dan Integrasi Nasional .....	9
2.3 Pancasila Sebagai Sebuah Ideologi .....	13
2.4 Model Teoritik Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Pada Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Integrasi Nasional.....	15
2.6 Penelitian Terdahulu .....	16
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
3.1 Latar Penelitian .....	19
3.2 Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	19
3.3 Kehadiran Peneliti .....	20
3.4 Data dan Sumber Data .....	21
3.5 Prosedur Pengumpulan Data .....	22

3.6	Pengecekan Keabsahan Data.....	25
3.7	Analisis Data .....	28
3.8	Tahap-Tahap Penelitian .....	29
3.9	Teknik Analisis Data.....	29
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>33</b>
4.1	Deskripsi Hasil Penelitian .....	33
4.1.1	Sosial Setting Kota Gorontalo.....	33
4.1.1.1	Kondisi Gorontalo Dalam Konteks Sosial Dan Budaya.....	33
4.1.1.2	Kondisi Ekonomi .....	35
4.2	Pembahasan Hasil Penelitian .....	36
4.2.1	Implementasi Nilai Pancasila Pada Masyarakat Lokal Dalam Prespektif Integrasi Nasional di Kota Gorontalo... 36	
4.2.2	Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Nilai Pancasila Pada Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Integrasi Nasional di Kota Gorontalo .....	43
4.2.2.1	Kondisi Sosial Budaya Dalam Masyarakat Yang Terbuka.....	43
4.2.2.2	Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Membangun Integrasi Bangsa Melalui Keterwakilan Etnis di Pemerintahan Kota Gorontalo.....	47
4.2.3	Model Empiris ( <i>Exitng Model</i> ) Implementasi Nilai-Nilai Pancasila .....	61
4.3	Analisis Pembahasan.....	63
4.3.1	Implementasi Nilai Pancasila Pada Masyarakat Lokal Dalam perspektif Integrasi Nasional di Kota Gorontalo .	63
4.3.2	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Pada Masyarakat Lokal Dalam	

Perepektif Integrasi Nasional di Kota Gorontalo .....	78
4.3.2.1 Kondisi Sosial Budaya Dalam Masyarakat Terbuka .....	78
4.3.2.2 Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Membangun Integrasi Bangsa Melalui Keterwakilan Etnis di Pemerintahan Kota Gorontalo .....	85
4.3.3 Model Rekomendasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Pada Masyarakat Lokal Yang Sesuai Dengan Dimensi Integrasi Nasional.....	92
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>100</b>
5.1 Simpulan .....	100
5.1.1 Implementasi Nilai Pancasila Pada Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Integrasi Nasional di Kota Gorontalo..	100
5.1.2 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Nilai Pancasila Pada Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Integrasi Nasional di Kota Gorontalo .....	101
5.1.2.1 Kondisi Sosial Budaya Dalam Masyarakat Yang Terbuka.....	101
5.1.2.2 Sejarah Keterwakilan Etnis Pada Kepemimpinan Daerah di Gorontalo dan <i>Representative</i> <i>Bureaucracy</i> Dalam Rekrutmen Pejabat di Provinsi Gorontalo .....	101
5.3 Saran.....	102
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>104</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>108</b>



## DAFTAR GAMBAR

Bagan. Hasil Rekontruksi Teori Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Pada Masyarakat Lokal Dalam Integrasi Nasional .....	16
Gambar 1. Analisis Data Model Intera .....	30

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup Ketua Peneliti .....	108
Lampiran 2. Daftar Riwayat Hidup Anggota Peneliti.....	110
SK Penetapan Dosen Penelitian dan Besaran Dana Penelitian .....	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Dalam Era Reformasi ada keinginan yang kuat agar daerah Gorontalo menjadi masyarakat sejahtera yang merupakan cita-cita dari pembentukan otonomi daerah. Namun pada waktu yang bersamaan provinsi Gorontalo ingin tetap memiliki dan mengembangkan keberibadian atau jatidirinya sebagaimana tersimpul pada nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Keberibadian masyarakat Gorontalo yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai pancasila tersebut misalnya implementasi sila ketiga persatuan Indonesia terlihat pada interaksi sosial masyarakat secara umum terjalin sangat harmonis, meskipun dalam komunitas penduduk yang ada terdapat berbagai ragam minoritas etnis pendatang yang sebagian besar berkonsentrasi di daerah perkotaan atau pusat-pusat kota kabupaten dan juga diperkampungan-perkampungan khusus.

Dilihat dari konstelasi penyebaran penduduk, masyarakat Gorontalo yang merupakan etnis yang tergolong menjadi penduduk asli sebenarnya menduduki komposisi penduduk mayoritas, Kondisi sosial masyarakat Gorontalo sangat harmonis dan didukung oleh budaya yang berbasis pada nilai-nilai agama Islam yang dianut oleh mayoritas masyarakat. Meskipun dalam kehidupan sosial, interaksi penduduk Gorontalo sebagai etnis mayoritas, namun mereka hidup berdampingan dengan etnis minoritas lainnya atau pendatang seperti Arab, Cina, Bugis, Makasar, Jawa, Minahasa, Sangir Thalaud, Bolaang Mongondow, Jawa Tondano, Bali dan kelompok etnis lainnya. Kalaupun ada interaksi tegang atau

hubungan konflik hal itu biasanya dalam jumlah yang sangat terbatas dan pada tingkat eskalasi yang rendah bila dibandingkan dengan daerah-daerah lain seperti kasus Poso.

Berdasarkan itu sebagai masyarakat lokal tentu mempersepsikan proses mewujudkan suatu masyarakat Gorontalo yang dinamis, toleran maupun harmonis dan didukung oleh upaya mewujudkan tujuan otonomi daerah yang esensinya bermuara pada peningkatan kesejahteraan adalah merupakan suatu pembangunan daerah kota Gorontalo yang mengandung makna pengamalan Pancasila. Sebab pembangunan suatu daerah tidak terlepas dari bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai pancasila yang merupakan pilar untuk membentuk eksistensi integrasi nasional.

## **1.2 Fokus Masalah**

Fokus utama masalah penelitian ini diuraikan dari topik utama penelitian, rumusan masalah penelitian. Rumusan fokus penelitian diuraikan secara detail dan meliputi fokus, sub fokus, sumber data yang digunakan. Akan tetapi tidak semua bisa disusun secara detail karena beberapa fokus penelitian dirumuskan dengan point-point penting yang akan dipertajam pada saat pengumpulan data dilaksanakan. Tentu hal ini mengacu pada teori yang telah dibahas sebelumnya yaitu teori integrasi nasional dari Weiner (1988), dan juga teori-teori lain sebagai pendukung seperti teori etnisitas dan integrasi nasional, serta Pancasila sebagai ideology.

Mengacu pada uraian tersebut di atas, maka fokus penelitian rekrutmen pejabat di lingkungan birokrasi pemerintahan daerah di kota Gorontalo sebagai berikut:

1. Implementasi nilai-nilai Pancasila pada masyarakat lokal berupa pengembangan kepribadian.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi berupa keterbukaan masyarakat, kesetiaan nasional dan asimilasi serta persatuan dalam keanekaragaman.
3. Menemukan model rekomendasi tentang implementasi nilai-nilai Pancasila pada masyarakat lokal yang sesuai dengan dimensi integrasi nasional berupa memelihara kohesivitas dan model masyarakat secara terbuka tanpa ada prasangka diskriminasi.

### **1.3 Perumusan Masalah**

Sebagai bagian dari upaya mengungkapkan fenomena tersebut, akan dirumuskan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi nilai-nilai Pancasila pada masyarakat lokal dalam perspektif integrasi nasional di kota Gorontalo? Dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kondisi tersebut?
2. Bagaimana model rekomendasi tentang implementasi nilai-nilai Pancasila pada masyarakat lokal yang sesuai dengan dimensi integrasi nasional?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan menginterpretasikan:

1. Implementasi nilai-nilai Pancasila pada masyarakat lokal dalam perspektif integrasi nasional di kota Gorontalo. Dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kondisi tersebut.
2. Model rekomendasi implementasi nilai-nilai Pancasila pada masyarakat lokal yang sesuai dengan dimensi integrasi nasional.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Untuk menjadi masyarakat sejahtera mengandung implikasi pembaharuan atau perubahan struktur dan budaya masyarakat. Pembaharuan atau transformasi itu antara lain memang dapat dilakukan melalui rekayasa berdasarkan kesepakatan yang dipegang sebagai paradigma ideal-normatif. Bagi daerah Gorontalo paradigma ideal-normatif tercantum dalam nilai-nilai dasar Pancasila. Sejalan dengan itu, menjadi daerah yang otonom yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah dan memelihara ikatan heterogenitas merupakan tujuan dari *nation building* atau dikenal dengan integrasi nasional yang harus sejalan dengan paradigma ideal-normatif yang merupakan cara untuk mengimplementasikan pengamalan makna dari nilai-nilai dasar dari pandangan hidup dan ideologi nasional bangsa Indonesia termasuk dalam masyarakat lokal.

Pemahaman ini menunjukkan bahwa dalam proses menjadi masyarakat yang maju dan sejahtera di daerah harus mampu menjiwai pembaharuan dan transformasi dengan nilai-nilai dasar Pancasila sebagai keperibadian atau jatidirinya. Nilai-nilai dasar itu tidak hanya sekedar menjadi landasan, namun juga sebagai perangsang dan pengendali serta tujuan dari pembaharuan dirinya dengan

memelihara kesatuan nasional yang selalu berhadapan dengan permasalahan loyalitas ke daerahan. Permasalahan ini muncul karena tidak sedikit daerah-daerah di Indonesia yang masyarakatnya heterogenitas dengan tingkat etnosentrismenya sangat tinggi yang disertai oleh politik etnis yang kuat dalam masyarakat dan mereka sendiri belum sepenuhnya tersatukan oleh ikatan satu kesatuan bangsa yang secara vertikal dibedakan oleh bahasa, kultur dan agama.

Untuk memperbaiki permasalahan yang terjadi dalam masyarakat majemuk tersebut termasuk di kota Gorontalo, perlu melakukan upaya untuk mengoptimalkan pemahaman nilai-nilai dasar Pancasila pada kehidupan masyarakat lokal dalam perspektif integrasi nasional. Sehingga melahirkan sebuah bangsa yang di dalamnya terdiri dari daerah-daerah yang terikat oleh kesatuan nasional yang berpodoman pada keutuhan Bhinneka Tunggal Ika. Kondisi yang demikian melahirkan sebuah bangsa termasuk di dalamnya daerah Gorontalo yang memiliki karakter dan nasionalisme yang kuat di tengah-tengah percaturan global.

Hasil dari kajian di atas, menunjukkan bahwa implementasi makna Pancasila pada kehidupan masyarakat lokal menghadapi problem teori (*Theoretical problem*) dan problem empiris (*emperical problem*). Berdasarkan hasil penelusuran teori dan penelitian yang ada terdapat problem teori khususnya implementasi nilai-nilai dasar Pancasila pada kehidupan masyarakat lokal dalam perspektif integrasi nasional terutama di daerah yang memiliki karakter masyarakatnya yang mengedepankan politik etnis dan etnosentrisme yang kuat. Bahkan keberadaan teori dan penelitian belum secara mendalam mengkaji dan membahas hal yang penting dalam implementasi makna Pancasila di tingkat

daerah terutama dalam hal penerapan ideologi negara dalam masyarakat majemuk dan faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut.

Untuk itu permasalahan tentang implementasi nilai-nilai Pancasila pada kehidupan masyarakat lokal dalam perspektif integrasi nasional di kota Gorontalo bagi peneliti butuh pengkajian lebih mendalam guna menciptakan bangsa Indonesia, khususnya pemerintahan daerah yang stabil dan menopang eksistensi integrasi nasional. Oleh karena itu menurut peneliti kajian tersebut sangat mendesak untuk dilakukan, mengingat teori dan penelitian mengenai implementasi nilai-nilai Pancasila pada kehidupan masyarakat lokal dalam perspektif integrasi nasional sebagaimana dikemukakan di atas belum mengkaji secara mendalam pada tingkat daerah, khususnya daerah yang cenderung masyarakatnya sedikit heterogen seperti kota Gorontalo. Keberadaan yang demikian dibuktikan masih banyaknya daerah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia yang masyarakatnya majemuk selalu menunjukkan stereotipe, etnosentrisme dan penguatan politik etnis yang cenderung memicu konflik vertikal maupun horizontal yang tentunya mengganggu bahkan meruntuhkan eksistensi integrasi nasional.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Integrasi Nasional**

Integrasi nasional sesungguhnya melibatkan persoalan kedaulatan terutama bagaimana kekuasaan beralih dalam kelompok-kelompok masyarakat dan bagaimana membagi/menggunakan kekuasaan di antara mereka. Bila dilihat dari sudut kekuasaan seperti, maka integrasi nasional pada dasarnya mencakup dua masalah yaitu: Pertama bagaimana membuat rakyat tunduk dan patuh pada tuntutan negara; Kedua, bagaimana meningkatkan konsensus normatif yang mengatur tingkah laku politik masyarakat atau individu-individu yang ada di dalamnya.

Bagi masyarakat yang relatif homogen mengatasi masalah integrasi nasional tidaklah begitu sulit, namun halnya dengan masyarakat yang bersifat heterogen. Weiner (1988, h. 551) mengajukan strategi yang ditempuh oleh suatu negara yaitu asimilasi dan persatuan dalam keanekaragaman (bagi Indonesia identik dengan Bhinneka Tunggal Ika. Menurut Weiner asimilasi adalah pencapaian integrasi dengan menjadikan kebudayaan suku yang dominan dalam suatu negara sebagai kebudayaan nasional. Hal ini dapat dicapai dengan jalan menundukkan identitas suku atau golongan minoritas kepada kebudayaan suku yang dominan. Sementara persatuan dalam keanekaragaman atau Bhinneka Tunggal Ika diartikan sebagai usaha untuk membentuk kesetiaan nasional yang

dilakukan dengan tidak menghilangkan kebudayaan kelompok-kelompok minoritas.

Konsep Weiner mirip dengan karya Coleman dan Rosberg (dalam Sjamsuddin, 1997, h. 4) yang menyatakan bahwa integrasi nasional adalah proses pemersatuan bangsa disuatu negara yang terdiri atas dua dimensi yaitu integrasi vertikal dan horizontal. Integrasi vertikal mencakup masalah-masalah yang bertujuan menjembatani celah perbedaan yang mungkin ada antara kaum elit dan massa dalam rangka pengembangan proses politik terpadu dan masyarakat politik yang berpartisipasi. Sedangkan integrasi horizontal bertujuan untuk mengurangi diskontinuitas dan ketegangan kultural kedaerahan dalam rangkas proses penciptaan suatu masyarakat politik yang homogen. Sementara Ake (1987, h. 13) menguraikan integrasi nasional dari sudut tautologis dimana istilah bangsa (*nation*) yang menjadi akar kata nasional itu secara normatif sudah mengandung makna kelompok manusia yang sangat terpadu. Dengan demikian istilah bangsa sudah dengan sendirinya merujuk pada integrasi karena komponen-komponenya memang sudah terintegrasi.

Berdasarkan gagasan-gagasan karya para ilmuwan di atas merupakan konsep-konsep yang bermanfaat bagi penelaahan kasus Indonesia terutama lebih khusus lagi adalah kota Gorontalo yang merupakan wilayah perkotaan yang menjadi ibu kota provinsi, yang secara hakiki adalah bagian dari negara kesatuan yang bergerak menuju proses kesetiaan nasional yang bersangkutan paut dengan kondisi budaya politik lokal dalam masyarakat. Dimana kesetiaan nasional harus diwujudkan dengan implementasi makna Pancasila dalam pola kehidupan

masyarakat melalui pematangan budaya politik lokal yang bermuara pada penciptaan rasa kebersamaan dalam masyarakat.

## **2.2. Etnisitas Dan Integrasi Nasional**

Konsep *nation building* banyak dipakai kalangan ilmuawan politik dalam membicarakan masalah integrasi nasional maupun politik dari negara berkembang maupun upaya negara-negara yang baru merdeka untuk mencapai jati dirinya. Negara-negara baru atau negara berkembang yang masyarakatnya pluralis (majemuk) selalu menghadapi masalah integrasi ditengah-tengah krisis dan ketegangan dalam mencari format yang tepat untuk mencapai suatu situasi yang mantap sebagaimana dicapai oleh negara-negara maju.

Dengan meminjam perumusan Robuska dan Shepsle (1972) dalam konfigurasi masyarakat majemuk yang dibagi dalam empat kategori yaitu: (1). Masyarakat majemuk dengan kompetisi seimbang; (2). Masyarakat majemuk dengan mayoritas dominan; (3). Masyarakat majemuk dengan minoritas dominan dan (4). Masyarakat majemuk dengan fragmentasi (dalam Nasikun, 1996, h. 5). Berdasarkan konfigurasi ini, Indonesia meskipun masyarakat Jawa sering dianggap memiliki posisi sangat dominan di dalam sistem sosial Indonesia. Masyarakat Indonesia barangkali lebih tepat dikategorikan ke dalam masyarakat majemuk dengan segmentasi daripada sebagai masyarakat majemuk dengan mayoritas dominan.

Konfigurasi model ini ditandai oleh masyarakatnya terdiri atas sejumlah besar kelompok etnis, semuanya dengan jumlah anggota yang kecil dan tidak

satupun memiliki posisi politik yang dominan. Masyarakat yang demikian ditandai oleh kehidupan politik yang sangat labil, tidak adanya lembaga-lembaga perantara atau komisi, rendahnya kemampuan membangun koalisi yang diperlukan untuk mengakomodasi konflik-konflik yang bersifat laten (*latent*) maupun nyata (*manifest*) akibat kecurigaan etnis dan pemerintahannya cenderung otoriter.

Di negara-negara tersebut masyarakatnya yang bercirikan pluralisme etnisitas sedang mengalami proses perubahan menuju ke arah negara-bangsa (*nation-State*) yang paripurna secara terus-menerus menghadapi permasalahan baik pada tingkat daerah (lokal) maupun nasional yang bersifat multi-kompleks. Semua hal yang dihadapi sangat berkaitan dengan prinsip identitas, loyalitas dan solidaritas yang bermuara pada seputar etnisitas dan masalah perkembangan nasionalisme.

Oleh karena itu berdasarkan argumentasi di atas dengan mengutip istilah *nation building* (integrasi nasional) dari Renan adalah sebagai suatu upaya terencana dan berkelanjutan untuk menanamkan kesadaran pada kalangan yang luas dalam masyarakat, bahwa walaupun beraneka ragam latarbelakang etnis, agama dan budaya mereka tetap adalah suatu bangsa (Bahar, 1998, h. 161). Sedangkan suatu *nation* yang secara bersama-sama dapat membangun masa depan yang lebih baik di dalam suatu *nation-state* yang sama-sama (Bendix, 1969).

Integrasi nasional sebagai sebuah konsep yang tidak berdiri sendiri, ia terkait dengan nasionalisme. Sedangkan sasaran nasionalisme itu sendiri adalah lebih dari sekedar penyebarluasan kesadaran berbangsa dan terbentuknya suatu

*nation state* yang bertujuan untuk mewujudkan suatu masa depan yang lebih baik bagi seluruh bangsa. Karenanya Kohn (dalam Mertodipuro, 1969) mengemukakan *nation building* dan *state building* sesungguhnya adalah *nasionalisme in action*.

Berkaitan pada pendefinisian sebelumnya, Smith (1981) berpandangan bahwa nasionalisme lahir dari ikatan yang didasarkan pada kesamaan agama, bahasa, adat istiadat, sejarah dan mitos asal-usul, yang semuanya didasarkan pada kesamaan etnis dan kultur. Smith mengacu pada kebangkitan etnis modern yang berperan dalam pembentukan nasionalisme dan mendefinisikan komunitas etnis atau etnis sebagai kelompok sosial yang anggotanya saling berbagi sentimen kesamaan asal-usul, klaim terhadap sejarah dan merasakan sentimen kebersamaan dan solidaritas. Sehingga ada anggapan etnis sebagai komunitas yang terisolasi dan secara politik dan pemerintahan terpinggirkan.

Berdasarkan parameter-parameter kajian yang telah dikemukakan dalam *nation building*, maka tentu hal yang sangat penting adalah peranan etnisitas dalam masalah integrasi nasional yang dihadapi oleh negara berkembang termasuk Indonesia. Problem fundamental dapat dikatakan bersumber pada pergeseran di dalam struktur kekuasaan yang diakibatkan oleh berdirinya negara-bangsa. Oleh karena itu integrasi nasional sebenarnya melibatkan persoalan kedaulatan, terutama menyangkut bagaimana kekuasaan beralih dalam kelompok-kelompok masyarakat dan bagaimana mereka membagi kekuasaan diantara mereka berdasarkan pada berbagai dimensi sosial masyarakat yang berbeda.

Kendati integrasi nasional sangat diharapkan untuk membangun suatu kohesivitas, akan tetapi terdapat problema integrasi nasional dalam masyarakat

majemuk yaitu secara politik terdapat kesulitan menyangkut batas-batas teritorial dan sosialisasi. Sedangkan dari aspek pemerintahan mengalami hambatan dalam hal pengembangan sistem pemerintahan dan aturan mainnya. Dengan demikian dinamika integrasi nasional dihubungkan dengan perkembangan nasionalisme dalam suatu masyarakat majemuk sangat tergantung pada dua parameter yaitu secara horizontal maupun secara vertikal.

Nasikun (1996, h. 8-9) melihat integrasi nasional dari segi horizontal ditentukan oleh dua hal yaitu: (1). Konfigurasi dasar struktur masyarakat yang bersangkutan berdasarkan sejumlah parameter nominal; (2). Karakter hubungan antara berbagai parameter sosial itu. Dalam hubungan dengan hal yang pertama, suatu masyarakat majemuk dengan kompetisi seimbang dan masyarakat majemuk dengan mayoritas dominan memiliki kemampuan untuk mengembangkan dinamika integrasi nasional dari pada suatu masyarakat dengan minoritas dominan atau masyarakat majemuk dengan segmentasi. Di dalam hubungan dengan faktor kedua, masyarakat majemuk dengan interaksi berbagai parameter struktur sosial memiliki dinamika integrasi nasional yang lebih tinggi daripada suatu masyarakat majemuk dengan struktur sosial yang terkonsolidasi. Logika yang mendasarinya adalah diferensiasi senantiasa menciptakan sekat-sekat yang membuat hubungan-hubungan sosial antara warganya tidak mudah berkembang.

Sedangkan secara vertikal, dinamika integrasi nasional masyarakat majemuk sangat ditentukan oleh derajat kesenjangan yang ada di dalam distribusi aset produksi, pendapatan, pendidikan, kekuasaan dan parameter-parameter *graduated* (yang dibagi dalam kelas-kelas) yang lain. Seperti halnya diferensiasi

horizontal menciptakan sekat-sekat hubungan sosial, kesenjangan sosial vertikal juga menciptakan dinding-dinding yang mempersulit hubungan-hubungan sosial antar kelas atau lapisan sosial dan demikian mempersulit terjadinya integrasi sosial. Lebih lanjut Nasikun mengatakan bahwa meningkatnya kesenjangan sosial yang terjadi sebagai akibat proses pembangunan, bahkan akan dapat melipatgandakan kendala integrasi sosial sekaligus mendorong atau memperkokoh terjadinya konsolidasi berbagai parameter nominal struktur sosial yang mendiferensiasikan masyarakat secara horizontal seperti ras, etnis, agama dan sejenisnya dengan parameter-parameter graduated seperti pendapatan, kekayaan, pendidikan, jabatan, kekuasaan dan sejenisnya.

### **2.3. Pancasila Sebagai sebuah Ideologi**

Sebuah ideologi sesungguhnya merupakan pandangan hidup sebuah bangsa yang bisa menciptakan sistem kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pandangan hidup atau ideologi yang dapat mendorong lahir dan berkembang dan membudayanya nilai-nilai instrumental yang menggerakkan bangsanya menjadi masyarakat maju adalah sebuah ideologi yang memenuhi syarat sebagai berikut:

Pertama, ideologi tersebut secara sadar diakui kebenarannya oleh masyarakatnya, bukan sesuatu yang dipaksakan kepadanya. Ideologi semacam itu biasanya mengandung nilai-nilai dasar yang digali langsung dari kekayaan budaya, pengalaman sejarah dan intelektual bangsa tersebut dan tercipta melalui proses musyawarah-mufakat para pendiri. Nilai-nilai dasar itu bukan saja diakui kebenarannya, tetapi sekaligus diyakini sebagai miliknya yang paling hakiki sebagai pegangan, landasan dan tujuan kehidupan bersama mereka.

Kedua, ideologi tersebut membuka dirinya untuk dikembangkan secara terus menerus dari generasi ke generasi sehingga menjadikannya hidup dan dinamis, bukan sesuatu yang kaku dan beku. Oleh karena tiap generasi merasa berhak untuk mengembangkannya, tentu tanpa mengingkari jatidiri atau nilai-nilai dasarnya sesuai dengan tuntutan dinamika kehidupannya yang makin maju, maka ideologi bukan saja tidak akan kehilangan relevansinya, tetapi juga akan makin mapan dan makin diyakini kebenarannya. Sifat terbuka seperti itu hanya mungkin dimiliki oleh ideologi demokrasi. Sifat terbukanya itu sekaligus berfungsi sebagai dinamika internal yang menggerakkan masyarakatnya untuk mengembangkan ideologi demokrasi yang dimilikinya.

Ketiga, ideologi demokrasi tidak mungkin dapat memelihara sifat terbuka yang menjadi dinamika internalnya itu bilamana masyarakat, terutama mereka yang memegang kekuasaan, tidak berhasil memiliki persepsi yang wajar dan sehat tentang itu. Sifat terbuka dari ideologi demokrasi mengandung makna bahwa tidak ada yang berhak memonopoli kebenaran tentang ideologi tu. Semua orang berhak mengembangkan pemikirannya, sejauh tidak main mutlak-mutlakan yang menganggap pemikirannya sajalah yang paling benar (Alfian, 1992, h. 21).

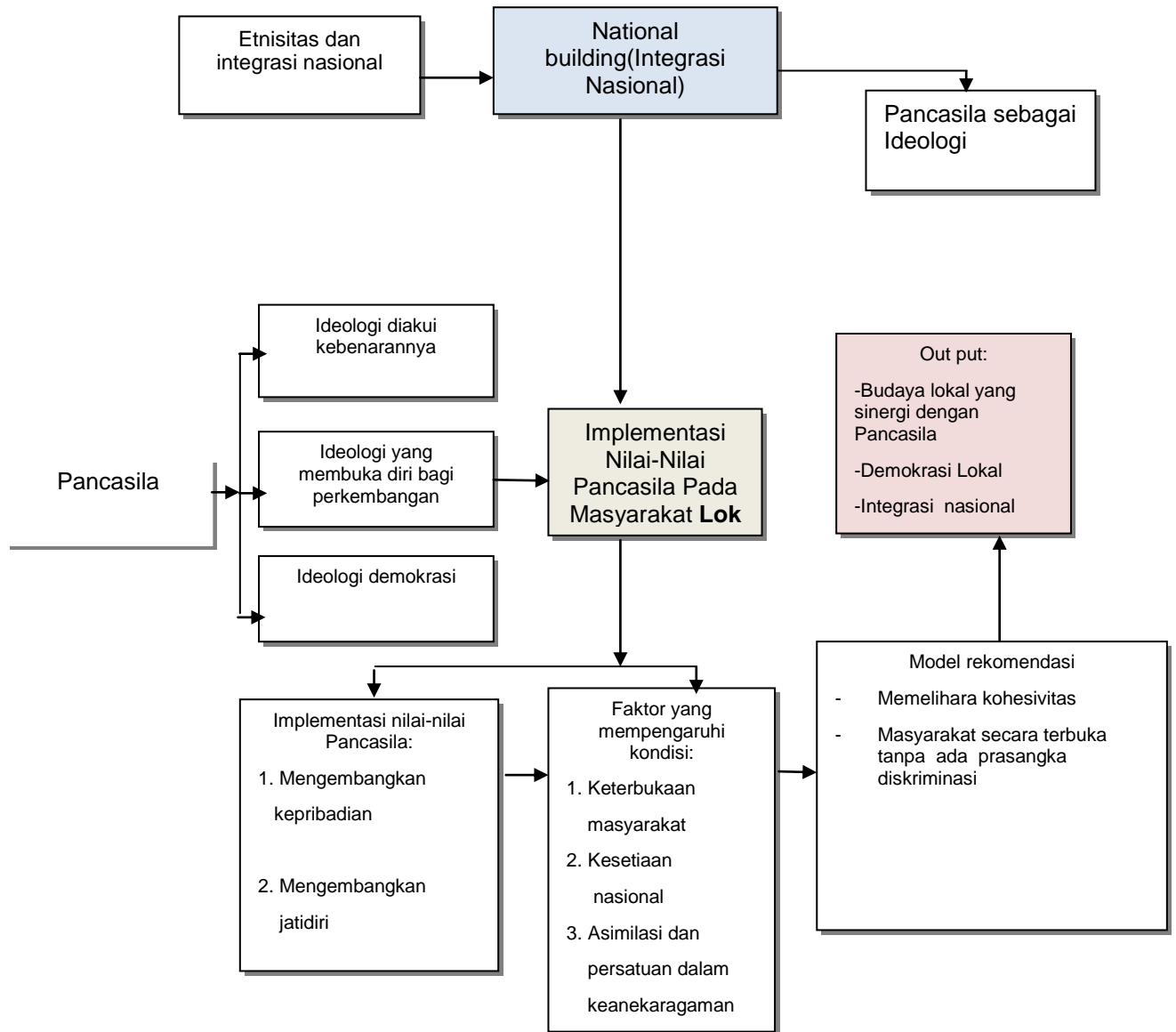
Berdasarkan ketiga parameter tersebut, maka dapat dikatakan bahwa Pancasila telah memenuhi persyaratan sebagai ideologi yang mampu merangsang lahir, berkembang dan menjiwai nilai-nilai instrumen yang diperlukan bangsa Indonesia untuk menjadi masyarakat modern, tidak lain tidak bukan karena ia adalah hasil galian bangsa Indonesia sendiri, melalui musyawarah-mufakat para pemimpin yang mewakili mereka. Pancasila bukan suatu ideologi yang paksakan



apalagi diimpor dari luar. Nilai-nilai dasarnya bersumber dari budaya, pengalaman sejarah bangsa Indonesia sendiri. Selain itu ideologi Pancasila merupakan ideologi demokrasi yang terbuka, dimana sifat tersebut sudah dimiliki sejak kelahirannya yaitu melalui proses musyawarah yang hangat, tegang, kreatif dan produktif. Dengan demikian Pancasila adalah jiwa dari Undang-Undang Dasar 1945 karena nilai-nilai dasarnya yang lima itu adalah nilai-nilai fundamental ideologi nasional yang bersifat hakiki yang tidak mungkin berubah.

## 2.4 Model Teoritik Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Pada Masyarakat

### Lokal Dalam Perspektif Integrasi Nasional Studi Di Kota Gorontalo



Sumber : Hasil Rekonstruksi Teori Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Pada Masyarakat Lokal dalam Integrasi Nasional , Weiner (1988), Ake (1987) dan Alfian (1992)

## 2.5 Penelitian Terdahulu

No	Judul / Tahun Terbitan	Peneliti	Lokasi	Metode	Temuan /Hasil
1	Sumbangan daerah dalam proses nation building/1994	Saafroedin Bahar	Indonesia	Kualitatif	Peranan daerah dalam proses nation building lebih banyak dalam wujud memberikan legitimasi dan dukungan massa bagi gerakan nasionalis dan bukannya sebagai pemrakarsa
2	Makna Pancasila dalam masyarakat industri modern/1992	Alfian	Indonesia	Kualitatif	Indonesia dalam pembangunan jangka panjang menginginkan menjadi masyarakat industri maju dan waktu bersamaan akan tetap memiliki keinginan dan kepribadian dan jatidiri yang tersimpul dalam nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila.
3	Integrasi nasional dan demokrasi/2005	Ichlasul Amal	Indonesia	Kualitatif	Persoalan integrasi nasional sangat unik bagi semua negara termasuk Indonesia, dimana resolusi konflik muncul karena akibat kekecewaan daerah dan etnis yang berfokus

No	Judul / Tahun Terbitan	Peneliti	Lokasi	Metode	Temuan /Hasil
					pada power sharing, penataan jaminan konstitusional, penghargaan identitas cultural, peningkatan kesejahteraan dan keadilan serta pelembagaan otonomi.
4	Beyond settles and native as political. Identities: Ever Coming The Political Legacy Of Colonialism/2001	Mahmood Mamdani	Afrika	Kualitatif dengan studi komparatif.	Elit daerah memperoleh kekuasaan dalam kerangka diskursus hukum adat yang kebanyakan terbelenggu dalam aturan-aturan berdasarkan etnis.
5	Fenomena Etnosentrisme Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah /2003	Djohermansyah, Djohan	Indonesia	Kualitatif	Fenomena dalam proses rekrutmen mengental dengan munculnya etnosentrisme dan nuansa etnis merebak dibanyak daerah baik di propinsi, kabupaten/kota. Seperti kasus menolak relokasi 3,5 juta pegawai pusat eks Kanwil/ Kandep ke daerah khususnya yang bukan berasal dari etnis masyarakat setempat seperti Riau, Kalimantan Barat dan Papua.

No	Judul / Tahun Terbitan	Peneliti	Lokasi	Metode	Temuan /Hasil
6	Ethnic Conflict In France; A Case For Representative Bureaucracy/2009	John Meier dan Daniel P Hawees	Perancis	Kualitatif dengan studi kasus	Mengkaji tentang asumsi mengenai nilai-nilai perbedaan, keleluasaan dan penggunaan representasi birokrasi menunjukkan sesuatu yang bias yang selalu bertentangan dengan individu yang tidak menjadi bagian dari nilai bangsa perancis seperti minoritas etnis dan waga kelas bawah.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Latar Penelitian**

Latar penelitian ini didasari oleh pertimbangan bahwa kurang lebih dalam satu dasawarsa reformasi yang bergelinding di Indonesia termasuk di tingkat lokal makna demokrasi yang yang menjadi isu utama reformasi tersebut cenderung telah membawa ketidakpastian dan ketidak tertiban bahkan kekerasan dimana-mana. Akibatnya eforia reformasi seakan-akan memarginalkan nilai-nilai kebangsaan antara lain nilai-nilai Pancasila yang menjadi landasan kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara yang tentunya bisa membawa dampak terganggunya integrasi bangsa. Meskipun terganggunya pilar-pilar kebangsaan tersebut, akan tetapi fenomena yang menarik adalah transformasi nilai-nilai kebangsaan antara lain dalam bentuk implementasi nilai-nilai di tingkat masyarakat lokal di kota Gorontalo cukup kondusif dan terpelihara dengan baik.

#### **3.2 Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Penelitian ini akan dilaksanakan dengan menggunakan metode kualitatif, yang menurut Lincon & Guba (1985) disebut sebagai paradigma *naturalistic*. Melalui pendekatan kualitatif ini, peneliti mendeskripsikan dan menemukan suatu fenomena yang memiliki karakter unik dalam implementasi nilai-nilai Pancasila pada masyarakat Gorontalo dalam perspektif integrasi nasional. Alasan digunakannya metode penelitian kualitatif dipandang tepat karena kesesuaian antara karakteristik penelitian kualitatif dengan fenomena yang dikaji. Penggunaan metode penelitian kualitatif ini diarahkan untuk mendeskripsikan dan

menganalisis fenomena implementasi nilai-nilai Pancasila pada masyarakat Gorontalo dalam perspektif integrasi nasional yang berkaitan dengan tiga permasalahan sebagai berikut: Pertama, implementasi nilai-nilai Pancasila pada masyarakat; Kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut; Ketiga, model rekomendasi tentang implementasi nilai-nilai Pancasila pada masyarakat Gorontalo yang sesuai dengan integrasi nasional. Relevansi pemakaian metode penelitian kualitatif dapat dipahami karena setiap permasalahan terdapat suatu gejala yang bersifat khusus dan saling berkaitan baik dalam implementasi maupun faktor yang mempengaruhinya dalam melaksanakan nilai-nilai Pancasila.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif karena penelitian ini lebih peka dalam menangkap berbagai fenomena informasi, khususnya yang berkaitan dengan fokus penelitian, disamping itu penelitian ini dapat menyajikan bentuk yang holistik dan menyeluruh dengan menganalisis suatu fenomena sosial.

Berdasarkan proses penelitian yang akan dilakukan, peneliti memperoleh penjelasan dan pengertian yang mendalam serta menyeluruh tentang fenomena implementasi nilai-nilai Pancasila dan sekaligus juga memberikan deskripsi yang dapat menggambarkan bahwa masalah-masalah tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

### **3.3 Kehadiran Peneliti**

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini yaitu dengan cara merekam kondisi sosial melalui interpretasi struktur keadaan yang berkaitan dengan bagaimana implementasi nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat kota Gorontalo. Kehadiran peneliti berusaha untuk mengumpulkan data mengenai kejadian empiris yang

terjadi di lapangan dan menganalisis data secara naturalistik, sehingga penelitian ini bersifat wajar, natural sebagaimana adanya dan tanpa manipulasi berdasarkan validitas empiris *setting* penelitian yang bersifat etic yang merupakan hasil dari interpretasi peneliti. Karena itu peran dari kehadiran peneliti dalam mengumpulkan data sangat menentukan dalam penelitian kualitatif. Hal ini disebabkan penelitian kualitatif bermaksud ingin memahami, mengungkapkan perasaan, pengertian, persepsi dan perilaku manusia, dan selain itu ingin menemukan makna dan interaksi manusia sebagai subjek dari kehidupan sehari-hari dalam situasi masyarakat tertentu. Dengan demikian tidak salah apabila kehadiran peneliti merupakan satu-satunya instrumen dan figure sentral dalam pelaksanaan penelitian ini.

### **3.4 Data dan Sumber Data**

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian kualitatif ini dengan menggunakan tehnik pengambilan sampel secara *purposive* dimana peneliti memakai berbagai pertimbangan yaitu berdasarkan konsep teori yang digunakan serta keinginan tujuan peneliti tentang karakteristik pribadi dari obyek yang diteliti. Data tersebut didapat dari berbagai sumber yaitu: (1). Informan yang dipilih secara *purposive* pada subyek penelitian yang dianggap menguasai permasalahan yang diteliti yang selanjutnya informan awal yang akan memberikan jalan kepada siap lagi informan yang bisa dimintai informasi dan seterusnya dengan cara *snowball* yang dilakukan secara serial sampai mencapai titik jenuh. Informan kunci yang didasarkan *purposive* adalah tokoh-tokoh masyarakat yang mewakili berbagai etnis 18 orang. Sedangkan informan dengan system metode *snow ball* antara lain anggota DPRD propinsi 2 orang, tokoh adat



dan masyarakat 7 orang, kalangan akademi 5 orang, Total seluruh informan adalah 32 orang sebagai informan. (2). Dokumen, berupa bahan-bahan tertulis antara lain peraturan, laporan, arsip dan lain sebagainya yang sangat berkaitan dengan penelitian ini. (3). Tempat dan peristiwa, yaitu sumber data tambahan yang diperoleh dengan melakukan observasi langsung ke lokasi yang sangat berhubungan dengan implementasi nilai-nilai Pancasila pada masyarakat kota Gorontalo.

### **3.5 Prosedur Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan secara *integrative* terhadap data-data yang relevan dan lengkap melalui sumber utama, sejalan dengan pendapat Lofland & Lofland (1984), bahwa langkah-langkah pengumpulan data dilakukan dengan: (1) *Prime sources of data* (sumber utama data), yaitu *world and action* yang terdiri dari kombinasi melihat dan mengamati, mendengar dan menyimak lalu menanyakan, (2) *supplementary data* (sumber pelengkap), yaitu melakukan pengumpulan dokumen melalui sumber pendukung, misalnya notulen hasil keputusan rapat, peraturan-peraturan pendukung dan kliping koran. Pencatatan data dilakukan ketika peneliti melakukan observasi partisipan, *interview write-up*, dan *intensive interview*, peneliti menggunakan pencatatan data (*field notes*).

Proses pengumpulan data didasarkan pada pendekatan yang dilakukan *naturalistic approach* yang sangat identik dalam tradisi ilmu sosial sebagaimana menurut Lofland & Lofland (1984) yaitu mengarah pada situasi dan kondisi *setting* penelitian, kejadian yang dialami oleh subyek penelitian (individu atau kelompok) atas dasar biografi, historis dan hubungan personal atau kelompok yang terjalin. Proses pengumpulan data itu meliputi tiga tahap sebagai berikut:

### 1. Proses Memasuki Lokasi Penelitian (*Getting In*)

Setelah melalui penyelesaian surat-surat yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian, peneliti melakukan pendekatan terhadap subyek penelitian untuk menjelaskan rencana dan maksud kedatangan peneliti. Langkah awal dari peneliti untuk bertemu dengan subyek yang dikehendaki adalah menciptakan suasana nyaman di lokasi penelitian sebagaimana dianjurkan oleh Lofland & Lofland yaitu: (1). Menjalin hubungan terpercaya dengan menciptakan koneksi, seperti kawan, kenalan, kolega yang diperkirakan memiliki akses terhadap subyek penelitian dan sumber informan-informan penting (*key person*); (2). Memberikan gambaran mengenai penelitian yang akan dilakukan; (3). Belajar membiasakan diri di lapangan yang kemudian berperan sebagai orang yang melakukan pembelajaran agar supaya memperoleh data yang valid dan perlu melakukan adaptasi dan proses belajar dengan sumber data sehingga bisa mengurangi jarak sosial antara peneliti itu sendiri dengan sumber sumber data. (4). Berperilaku secara sopan santun dalam bernegosiasi agar mendapatkan data lapangan yang akurat dan memperoleh *entry* yaitu berupa ijin, *interview*, aktor, proses dan interaksi.

### 2. Ketika Berada di Lokasi Penelitian (*Getting along*)

Pada saat peneliti sudah berada di lokasi penelitian sedapat mungkin mempertahankan keakraban, saling menghormati satu sama lain, agar supaya lebih terjalin hubungan yang baik dengan subyek penelitian, sehingga dengan mudah mendapatkan informasi yang lengkap, akurat dan bisa menangkap makna dan informasi dari hasil pengamatan. Untuk menciptakan kondisi ini, maka peneliti sebaiknya memiliki tiga hal sebagaimana dikemukakan oleh

Lofland & Lofland yaitu: (1). *Stance* berupa kepercayaan timbal balik antara peneliti dan subyek penelitian; (2). *Style*, berupa gaya peneliti harus merendah sehingga dapat diterima dan tidak dianggap menimbulkan ancaman bagi peneliti; (3). *Situation*, yakni upaya untuk menyelesaikan masalah dengan bersikap netral, bila saat itu peneliti menghadapi pertentangan di antara subyek penelitian.

### 3. Pengumpulan Data (*Logging the data*)

Pada tahap ini ada tiga macam tehnik pengumpulan data dilakukan yaitu:

- a) Observasi yang mengamati secara langsung dengan menemukan peristiwa yang secara alamiah atau natural yang berkaitan dengan rekrutmen pejabat. Hasil observasi ini menemukan sumber informasi penting yang menunjang penelitian yaitu ditemukannya peristiwa yang mencakup segala sesuatu yang terjadi dan berhubungan dengan fenomena naturalistik dalam pola rekrutmen pejabat di lingkungan birokrasi pemerintahan daerah yang menggambarkan dimensi *representative bureaucracy*. Berdasarkan pengamatan ditemukan data-data yang lebih relevan untuk menjawab permasalahan dari pertanyaan penelitian, sekaligus memperkuat teori yang digunakan.
- b) Wawancara mendalam (*In Depth-Interview*), dilakukan untuk mendapatkan informasi (data empiris) yang berkaitan dengan pemahaman tentang: implementasi nilai-nilai Pancasila pada masyarakat lokal.
- c) Dokumentasi, melalui tehnik ini peneliti menghimpun berbagai dokumen antara lain gambaran menyangkut implementasi nilai-nilai Pancasila pada masyarakat kota Gorontalo.

### 3.6 Pengecekan Keabsahan Data

Dalam melaksanakan setiap penelitian, peneliti selalu membutuhkan standar untuk melihat derajat kepercayaan terhadap data yang dikumpulkan untuk memenuhi derajat penelitian kualitatif melalui keabsahan data yang bisa dipertanggungjawabkan, sehingga dapat memberikan hasil penelitian yang berkualitas. Untuk menentukan tingkat keabsahan data, maka diperlukan empat tehnik pemeriksaan seperti yang dikatakan oleh Nasution (1992) yaitu:

#### 3.6.1 Kredibilitas (*credibility*)

Untuk mendapatkan sebuah hasil penelitian dapat diterima dan dipercayai, ada beberapa cara yang perlu ditempuh antara lain:

1. Memperpanjang masa observasi (*Prolonged Engagement*)

Dengan memperpanjang masa observasi artinya peneliti harus tinggal di tempat penelitian yang cukup lama dengan tujuan sebagai berikut: (1). Agar dapat menumbuhkan kepercayaan dan subyek yang diteliti; (2). Agar dapat menghindari distorsi akibat kehadiran peneliti di lapangan. Lamanya waktu bagi seorang peneliti kualitatif untuk tinggal di tempat peneliti tidak dapat ditetapkan dan tergantung pada sempit atau luasnya cakupan fokus penelitian. Dalam hal ini peneliti melaksanakan pada masyarakat kota Gorontalo dan selama 6 (enam) bulan yaitu dari bulan Mei sampai dengan bulan Oktober 2012.

2. Pengamatan yang terus menerus (*Persistent observation*)

Dalam pelaksanaan penelitian, peneliti harus berusaha semaksimal mungkin untuk mengadakan pengamatan yang terus menerus, berkesinambungan dan kontinu, agar supaya bisa muncul gejala yang lebih cermat, terperinci dan

mendalam tentang implementasi nilai-nilai Pancasila pada masyarakat lokal di kota Gorontalo. Permasalahan penelitian yang diangkat oleh peneliti sesungguhnya sudah diamati jauh sebelum dilakukan penelitian ini, sebab peneliti banyak bersentuhan dengan mereka yang berkepentingan terhadap masalah-masalah implementasi nilai-nilai Pancasila pada masyarakat kota Gorontalo.

### 3. Triangulasi

Triangulasi dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengecek kebenaran data yaitu membandingkan data yang diperoleh dari lapangan dengan data dari temuan sumber lain. Dalam istilah lain triangulasi yaitu pemeriksaan yang dilakukan dengan cara *cross check* atau pemeriksaan terhadap data atau informasi orang lainnya. Triangulasi dalam penelitian kualitatif pada umumnya merujuk pada pengumpulan informasi (data) sebanyak mungkin dari berbagai sumber dan bagi peneliti dalam rangka untuk mencapai kebenaran hasil penelitian yang dapat dipercaya diuntungkan dalam beberapa hal antara lain: (1). Dapat mengurangi terjadinya suatu resiko dengan terbatasnya kesimpulan, metode dan sumber data tertentu; (2). Dapat meningkatkan tingkat validitas dari suatu kesimpulan sehingga lebih memperluas ranah penelitian, sehingga bias yang melekat (*inherent*) pada satu sumber data, peneliti dan metode tertentu akan ternetralisasi oleh informasi yang digali dari sumber data, peneliti dan metode lain. Oleh karena itu ada tiga pola triangulasi yang ditempuh adalah perbandingan terhadap data, sumber data dan tehnik pengumpulan data.

### 3.6.2 Keteralihan (*transferability*)

Dalam keteralihan yang berkaitan dengan persoalan empiris akan bergantung pada kemiripan antara konteks pengirim dan penerima. Untuk melaksanakan tindakan keteralihan tersebut, peneliti berusaha untuk mengumpulkan data mengenai kejadian empiris dalam konteks yang sama. Dalam penelitian fenomenologi naturalistik, keteralihan itu sangat tergantung pada peneliti itu agar supaya hasil penelitian ini dapat digunakan dalam konteks dan situasi tertentu. Keterlibatan merupakan validitas eksternal pada konteks empiris *setting* penelitian, yaitu emic yang diterima peneliti dan etic yang merupakan hasil dari interpretasi peneliti. Dengan keteralihan dapat dicapai lewat uraian yang cermat, rinci, tebal atau mendalam serta adanya kesamaan konteks antara pengirim dan penerima.

### 3.6.3 Kebergantungan (*dependability*)

Dalam memeriksa kebergantungan dan kepastian data hasil penelitian bisa diuji kembali melalui proses *audit* yang cermat terhadap seluruh komponen dan proses penelitian dan hasil penelitian. Oleh karena itu kebergantungan yang istilah konvensionalnya disebut *reliability* sebagai syarat bagi validitas.

### 3.6.4 Kepastian (*confirmability*)

Dalam penelitian ini kepastian suatu penelitian dapat dikonfirmasi dengan cara *audit trail* dimana jejak yang dapat dilacak atau diikuti oleh pemburu untuk memeriksa ketelitian yang kemudian mengkonfirmasi dan sekaligus menjamin kebenarannya.

### 3.7 Analisis Data

Analisis data sebagaimana diuraikan oleh Bogdan dan Biklen (1998) adalah hal yang berkaitan dengan proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang telah dikumpulkan oleh peneliti. Kegiatan yang berkaitan dengan analisis dilakukan dengan menelaah, menata pola, menemukan apa yang bermakna dan apa yang diteliti dilaporkan secara sistematis. Oleh karena itu analisis data dapat diformulasikan sebagai proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga dengan mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Akan tetapi dalam pencarian tersebut harus dilakukan secara kontinu sampai dengan mendapatkan data yang valid karena hal ini tidak terlepas dari pandangan Miles dan Huberman (1992) yang mengemukakan bahwa *the most serious and central difficulty in the use of qualitative data is the methods of analysis are not well formulate* (Hal yang paling berat dan sangat sulit dalam penggunaan data kualitatif yaitu metode analisis belum dirumuskan dengan baik).

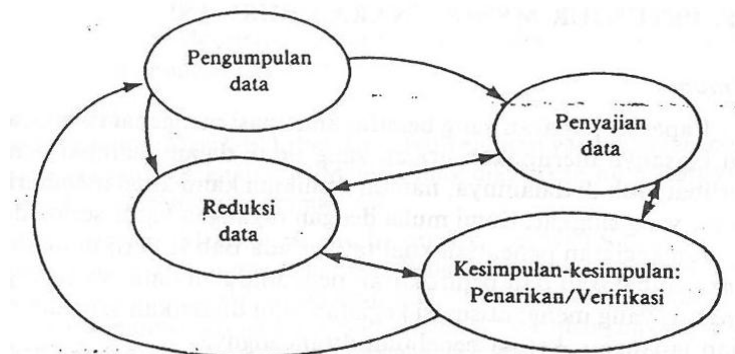
Pada penelitian kualitatif, analisis data tidak mesti dilakukan setelah proses pengumpulan data selesai, namun juga analisis data kualitatif dapat dilakukan begitu peneliti memasuki lokasi kancah penelitian. Dalam pengertian bahwa peneliti telah menafsirkan, menginterpretasikan data-data dan informasi sesuai dengan konteks penelitian serta melakukan evaluasi terhadap data-data yang dianggap tidak sesuai. Sehingga peneliti dapat selalu berinteraksi dengan sumber data baik itu informan kunci, peristiwa-peristiwa maupun dokumentasi sehingga pencarian data dan informasi dapat sesuai dengan harapan peneliti.

### 3.8 Tahap-Tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian dilakukan mulai dari observasi lapangan yang mengamati secara langsung berbagai peristiwa yang secara alamiah atau natural yang berkaitan dengan implementasi nilai-nilai Pancasila, pengumpulan data baik itu berasal dari sumber utama data maupun sumber pendukung data. Selanjutnya dilakukan analisis data yang berlanjut pada analisis pengembangan dimana data-data dikelompokkan yaitu dari hasil data yang diperoleh dalam catatan lapangan, rekaman wawancara, dokumentasi semuanya peneliti kembangkan dalam suatu bentuk analisis yang kemudian diinterpretasi melalui tahapan pemaknaan yang bersifat alami. Karena itu proses tahapan analisis data sejak data yang diperoleh di lapangan dituangkan dalam tulisan dan diklasifikasi selanjutnya dianalisis secara terus menerus sepanjang waktu penelitian berlangsung.

### 3.9 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis model interaktif (Miles dan Huberman, 1992) yang terdiri dari tiga komponen analisis, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Analisis ini dilakukan dalam bentuk interaktif pada komponen utama, sebagaimana disajikan dalam gambar berikut ini.



Gambar 1. Analisis Data Model Intera  
Sumber: Miles dan Huberman (1992)



Berdasarkan argumentasi dari Miles dan Huberman (1992, h.30) sebagaimana diperlihatkan dalam gambar bahwa model analisis interaktif (*interactive model of analysis*) terdiri dari tiga komponen yaitu:

1. Reduksi Data (*reduction data*), adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan mentransformasikan data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Laporan lapangan akan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal penting yang kemudian dicari tema atau polanya. Reduksi data berlangsung terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Selama pengumpulan data berlangsung diadakan tahap reduksi data, selanjutnya membuat ringkasan, menelusuri tema dan menulis memo. Dengan kata lain reduksi data merupakan analisis data yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, menyortir yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga kesimpulan dapat ditarik dan diverifikasikan. Khusus untuk *editing* kata, peneliti harus memperbaiki kata-kata yang lahir dari hasil wawancara terutama kata-kata yang tidak baku dan cenderung mengulang-ngulang.
2. Penyajian Data (*data display*) adalah merupakan alur penting dari kegiatan analisis dimana peneliti membatasi sajiannya dari suatu kumpulan informasi yang telah tersusun berdasarkan pada fokus penelitian dan tujuan penelitian. Data disajikan secara naratif dengan gaya kalimat yang baik dan menggunakan kutipan langsung maupun tidak langsung dalam memperjelas makna yang dinarasikan.
3. Penarikan Kesimpulan (*concluding drawing*) adalah peneliti selalu mereduksi data dan sajian sampai pada penyusunan kesimpulan berdasarkan data yang

ada pada *fieldnote* atau catatan yang ada di lapangan, peneliti berusaha membuat pemahaman dari segala peristiwa yang bisa memberikan makna yang selanjutnya dibuat dalam penyusunan data yang bersifat narasi. Dalam tahap ini menurut Miles dan Huberman (1992) peneliti sangat berkompeten untuk membuat suatu kesimpulan yang longgar namun tetap terbuka dan skeptis.

## **BAB V**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Deskripsi Hasil Penelitian**

##### **4.1.1. *Social Setting* Kota Gorontalo**

###### **4.1.1.1. Kondisi Gorontalo Dalam Konteks Sosial dan Budaya.**

Kota Gorontalo merupakan wilayah otonom yang telah berdiri sendiri pada tanggal 20 Mei 1960 sebagai pelaksanaan Undang-Undang No.29 Tahun 1959 tentang pembentukan Dati II di Sulawesi. Luas wilayah kurang lebih 64,79 KM. Daerah kota Gorontalo yang terletak di tengah-tengah sebelah utara kecamatan Tapa kecamatan Bone Bolango, sebelah timur kecamatan Kabila kabupaten Bone Bolango, sebelah Selatan teluk Tomini dan sebelah Barat kecamatan Batudaa kabupaten Gorontalo. Wilayah ini memiliki Sembilan kecamatan yaitu kecamatan kota Selatan, kota Utara, kota Barat, kota Timur, Duingingi, kota Tengah, Dumbo Raya, Hulontaloangi dan Sapatana. Sehingga dengan Sembilan kecamatan tersebut mempunyai empat puluh Sembilan kelurahan.

Masyarakat kota Gorontalo sebagai kelompok mayoritas memiliki budaya, bahasa Gorontalo dengan tingkat kulturalnya daerah perkotaan ini sangat kental dan bernuansa religius dengan semboyan adat bertumpu pada syara, syara bertumpu pada Al-Quran (adat hulo-huloo to saraa, saraa hulo-huloo to Qurani). Dengan secara sosiologis kultur Gorontalo sangat mewarnai seluruh kehidupan mulai dari kelahiran, perkawinan, kematian dan acara serimonial lainnya seperti acara kenegaraan yang dilakukan pada lokus daerah. Bahasa yang digunakan sehari-hari adalah bahasa Melayu dialek Manado yang banyak digunakan oleh

masyarakat perkotaan, sementara bahasa Gorontalo masih tetap digunakan oleh masyarakat meskipun dikalangan generasi muda bahasa daerah ini mulai dilupakan karena mereka sehari-hari lebih banyak menggunakan bahasa melayu dialek Manado.

Sedangkan ditinjau dari agama yang dianut oleh penduduknya adalah agama Islam yang merupakan agama mayoritas penduduk perkotaan, sementara sisanya yang merupakan masyarakat pendatang beragama lain yakni Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Kongkhuchu yang semuanya dalam jumlah yang kecil. Berdasarkan realita dimasyarakat bahwa penduduknya dominan disetiap kelurahan, maka terdapat sejumlah Mesjid dalam ukuran besar maupun kecil, sehingga dengan dominasi agama yang dianut oleh masyarakatnya seringkali persepsi masyarakat mengidentifikasikan daerahnya merupakan basis Islam, bahkan dikatakan sebagai daerah Serambi Mekah. Dengan demikian agama Islam sebagai agama mayoritas sangat identik dengan orang Gorontalo, karena mereka menganut agama ini sejak tahun 1525. Meskipun pemerintah kolonial Belanda (VOC) pernah menguasai kerajaan di Gorontalo dan berusaha menyebarkan agama Kristen, namun upaya mereka tidak berhasil. Para raja dan masyarakatnya tidak mau menganut agama lain selain Islam dan berbeda dengan daerah-daerah disekitarnya, seperti Sangir Thalaud, Minahasa, pemerintah Belanda mampu menyebarkan agama Kristen pada penduduk setempat. Karena itu salah satu yang bisa merekatkan solidaritas sosial masyarakat kota Gorontalo adalah agama Islam yang telah ada berabad-abad lamanya dan sebagai simbol yang bisa mempersatukan masyarakat, meskipun mereka dipisahkan dalam organisasi keagamaan yaitu organisasi NU dan Muhammadiyah.

Dalam struktur masyarakat kota Gorontalo berdasarkan pembilahan etnis antara para pendatang maupun penduduk asli, ternyata menunjukkan komposisi etnis Gorontalo sebagai kelompok mayoritas, etnis Arab, Cina, Jawa, Jawa Tondano, Minahasa, Sangir Thalaud, Bolaang Mongondow dan sejumlah etnis lainnya.

#### **4.1.1.2 Kondisi Ekonomi**

Gorontalo dulunya sebagai kerajaan yang berdiri sejak tahun 1585 yang di dalamnya termasuk kota Gorontalo yang kita kenal sekarang didirikan oleh Sultan Botutihe, sehingga kota ini terkenal sebagai daerah yang menarik yakni kota niaga besar, sehingga menarik pemerintah Hindia Belanda untuk menjadikan Gorontalo sebagai wilayah kekuasaannya bersama-sama dengan Maluku, Minahasa dan daerah sekitarnya. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda jalur niaga yang terpenting adalah Gorontalo menghubungkan daerah Minahasa dan wilayah Maluku terutama daerah kesultanan Ternate. Karena kedudukan sebagai daerah niaga dan penghasil bumi yang cukup besar terutama perkebunan, telah membawa masyarakat Gorontalo berorientasi pada pertanian, perkebunan dan perdagangan.

Sebagai ibu kota provinsi Gorontalo yang juga sebagai pusat perdagangan di daerah ini, pemerintah daerahnya tidak henti-hentinya mengembangkan pembangunan wilayahnya dengan memberikan kemudahan termasuk kepada pengusaha, maupun nelayan. Tampaknya di bidang pembangunan, pusat-pusat perbelanjaan yang megah mendapat kemudahan dari pemerintah kota. Hal ini sebagai sebuah kebijakan yang diambil dengan tujuan menggerakkan sektor perdagangan dan industri jasa dengan memberi kemudahan dalam bentuk

perijinan. Selain itu pemerintah yang didukung oleh memberi kemudahan tidak hanya pada pengusaha besar, tetapi juga kepada pengusaha kecil.

Kondisi tersebut dibangun untuk mendukung struktur perekonomian masyarakat kota Gorontalo pada umumnya yang didominasi oleh lapangan usaha tradisional (padat karya). Salah satu bisnis dari hasil industri tradisional masyarakat Gorontalo yaitu kerajinan yang terbuat dari rotan, kue pia khas Gorontalo dan kain kerawang yang telah menjadi salah satu andalan industri kecil di tingkat nasional. Industri ini hampir ditemukan dipinggiran kota Gorontalo. Begitu menjamurnya kerajinan dalam masyarakat mendorong pemerintah kota berusaha meningkatkan kualitas seiring dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan yang ditempuh oleh dinas koperasi, UKM dan tenaga kerja adalah pemberian dana untuk meningkatkan usaha kecil dan menengah.

## **4.2 Pembahasan Hasil Penelitian**

### **4.2.1 Implementasi Nilai Pancasila Pada Masyarakat Lokal Dalam Perspektif**

#### **Integrasi Nasional Di Kota Gorontalo**

Dalam konstelasi kehidupan sehari-hari implementasi Pancasila di masyarakat Kota Gorontalo yang merupakan pusat ibu kota provinsi Gorontalo sangat menarik untuk diamati mengingat kehidupan masyarakatnya yang sedikit pluralisme dengan berbagai latar belakang sosial yang berbeda-beda. Sehingga dalam pelaksanaan Pancasila selalu berkaitan dengan berbagai aspek termasuk dalam interaksinya seringkali terjemahkan dalam arti yang abstrak atau secara umum maupun konkrit yang beragama, namun mempunyai hakekat isi yang bersifat mutlak ada dalam negara dan tidak akan berubah atau hilang selamanya.

Karena Pancasila sebagai konsensus nasional untuk menjadikannya sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, sehingga sebagai suatu landasan yang memiliki nilai-nilai hakiki yang terformat dalam ideologi bangsa Indonesia. Pandangan ini menurut ilmuawan Roni Lukum MSc sebagai ahli Ketahanan Nasional yang mengemukakan bahwa:

Pancasila sebagai ideologi bangsa merupakan asas yang paling prinsipil dalam mempertahankan kehidupan nasional bangsa Indonesia yang begitu heterogen dan sekaligus sebagai alat yang ampuh dalam menjaga eksistensi ketahanan nasional baik itu dari pengaruh dunia luar maupun tantangan yang lahir dari masyarakat itu sendiri (Wawancara, tanggal 12 Juli 2012)

Argumentasi ini bila dicermati secara seksama, Pancasila tentu tidak bisa dipisahkan sebagai dasar negara yang digali dari kristalisasi nilai-nilai dari sosio kultural bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai pandangan hidup, ideologi, perjanjian luhur bangsa, jiwa kepribadian masyarakat Indonesia yang sangat santun, sebagai sumber hukum, filosofi bangsa, arah dan tujuan nasional dan sekaligus sebagai bingkai yang menjadi podium pembangunan politik bangsa termasuk di dalamnya dalam rangka menjaga persatuan bangsa. Menurut responden yang tidak mau disebutkan namanya yang berasal dari abang bentor mengungkapkan secara sederhana dengan kata-kata yang tidak formalistis namun dengan memiliki makna yang sederhana mengatakan bahwa:

Pancasila kalau diamalkan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam lima sila, maka masyarakat kita pasti taat beragama, bersatu, menghormati hukum, dan tidak ada perkelahian dimana-mana dan tujuan pembangunan tercapai seperti zaman Orde Baru dulu. Sekarang justru sebaliknya masyarakat saling bertikai, tidak ada kepatuhan hukum dan masyarakat (kitorang) sangat susah mencari uang ini semua karena kita meninggalkan nilai Pancasila (wawancara, tanggal 6 Mei 2012).

Pernyataan yang sangat orisinal dari masyarakat dengan gaya bahasa mereka, tentu bila dilihat dari nilai-nilai yang terangkai dan menyatu menjadi satu dalam makna Pancasila sebenarnya bersumber dari budaya dan pengalaman masyarakat Indonesia yang menciptakan ideologi Pancasila. Dengan kata lain perkembangan nilai-nilai dasar itu berakar dan hidup dalam realitas kehidupan mereka terutama pada waktu mereka berkonsensus untuk menjadikannya menjadi ideologi bersama. Memang benar bahwa nilai-nilai dasar itu secara sendiri-sendiri, karena sifatnya yang fundamental. Kaidah fundamental filsafatnya sangat berfungsi sebagai asas kerohaniawan bangsa dan negara, namun bila ditelusuri dari sosio kultural sebagai bangsa yang mewarisi martabat dan peradaban yang masyarakatnya sangat heterogen, maka tantangan yang sangat berarti adalah masalah integrasi nasional termasuk masyarakat di kota Gorontalo.

Mengapa demikian karena salah satu peranan Pancasila yang menonjol sejak permulaan penyelenggaraan negara mulai dari pembentukannya hingga sekarang adalah Pancasila berfungsi untuk menyatukan berbagai seluruh elemen dalam masyarakat kota Gorontalo menjadi masyarakat yang berkepribadian dan bersatu, tidak terpecah belah. Menurut Prof Dr Yasin Tuloli MPd dalam diskusi yang diselenggarakan oleh LSM Pilar bangsa yang membahas tentang Pancasila sebagai paradigma kehidupan dalam bermasyarakat berbangsa dan bernegara mengungkapkan bahwa:

Pancasila sebagai dasar negara dan bangsa sangat memperhatikan kehidupan bermasyarakat termasuk masyarakat yang berbagai latar belakang sosial, agama, bahasa yang ada dalam masyarakat Indonesia. Berbagai perbedaan dalam masyarakat bisa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika baik sejak zaman dulu hingga sekarang (diskusi tanggal 23 Mei 2012)



Dalam masyarakat di kota Gorontalo kondisi sosial sejak terbentuk kota Gorontalo berdasarkan surat keputusan gubernur kepala daerah administratif Sulawesi Utara Tengah tahun 1960 yang didasarkan pada aturan normatif pada UU No.1 Tahun 1957 tentang otonomi daerah (Perpu No.6 Tahun 1959 dan Perpu No. 5 Tahun 1960 kota Gorontalo sebagai Kotapraja dan kemudian diperkuat dengan UU No. 18 Tahun 1965 istilah Swapraja diganti dengan kotamadya, sebenarnya masyarakatnya sedikit mencerminkan heterogenitas. Sebagai masyarakatnya memiliki berbagai dimensi pembilahan sosial yang dilatarbelakangi oleh kecenderungan sedikit muti etnis, agama dan sub-ideologis agama (NU dan Muhammadiyah). Kemajemukan masyarakatnya tidak lain ditandai dengan adanya perbedaan yang saling berinteraksi satu sama lain dalam berbagai tatanan kehidupan masyarakat yang menjadi pilar-pilar yang memperkaya beragama budaya di tengah antara budaya mayoritas etnis Gorontalo dan etnis-etnis lainnya yang merupakan kelompok minoritas. Meskipun tidak bisa dipungkiri pernah terjadi konflik laten maupun termanifest antara etnis Gorontalo dan etnis keturunan Cina sebagai faktor ketersinggungan agama dan budaya Gorontalo pada tahun 1980-an. Akan tetapi dewasa ini kehidupan bersama dan saling tenggang rasa sudah terbina kembali. Menurut seorang responden bahwa:

Hubungan antara masyarakat di Kota Gorontalo termasuk juga di seluruh Gorontalo sudah terbina harmonis dan saling menghormati satu sama lain misalnya bagaimana etnis keturunan sering membantu masyarakat Gorontalo dalam hari-hari keagamaan misalnya mereka ikut meramaikan pasang lampu (tumbilo tohe) pada tiga malam menjelang lebaran dan bantuan-bantuan sosial lainnya, bahkan ada yang sudah kawin dengan masyarakat Gorontalo (Wawancara tanggal 27 April 2012).

Pandangan ini sejalan dengan arumentasi dari kandidat Doktor Sosiologi Alim Niode dari Universitas Brawijaya Malang yang juga ahli budaya Gorontalo menyatakan bahwa:

Ulipu tolalo bangusa, batangpomaya, nyawa podungala, harata potumbulu artinya bangsa dan negara dipertaruhkan dengan jiwa raga dan harta kekayaan dan kemuliaan dan selanjutnya masyarakat Gorontalo memilikifilosofi tentang pandangan hidup harmoni dan tidak suka disharmonis atau dirumuskan dalam adati asali (ketentuan alam) yang sangat meletakkan dasar adanya keharmonisan dalam masyarakat (wawancara tanggal 16 Juli 2012).

Dengan melihat kondisi masyarakat kota Gorontalo yang demikian harmonis akhir-akhir ini, maka tentu masalah utama yang perlu diambil adalah bagaimana lebih mengefektifkan cara menggalang persatuan dan kesatuan daerah Gorontalo yang merupakan bagian integrasi nasional bangsa Indonesia. Dimana masyarakatnya sudah lama memelihara *nation and character building* yang merupakan prasyarat utama dalam membangun keharmonisan bangsa.

Dalam kehidupan sosial masyarakat kota Gorontalo implementasi Pancasila terlihat jelas misalnya di sekolah-sekolah mulai dari tingkat TK, sekolah dasar, SLTP maupun SLTA sampai dengan perguruan tinggi upaya untuk memelihara keharmonisan sosial cukup tinggi. Berbagai jenjang pendidikan sekolah memberikan kesempatan kepada setiap pemeluk agama untuk mendapat pendidikan agama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Penyebaran implementasi Pancasila. Sedangkan di beberapa tempat tempat peibadatan yang didirikan yang dipergunakan sendiri oleh para pemeluk agamanya. Berbagai perayaan keagamaan diberikan kesempatan dan izin oleh pemerintah bahkan tak jarang kelompok masyarakat terlibat langsung untuk membantu upacara keagamaan misalnya Barongsai bagi umat Khongkhucu. Kondisi masyarakat

yang harmonis seperti ini menurut Revoltje Kaunang sebagai ahli pendidikan dan juga tokoh agama Kristen Protestan dikatakan bahwa

Hubungan antara masyarakat di Gorontalo sangat toleran baik itu dilihat dari dasar etnis, agama dan sebagainya, sehingga masyarakat Gorontalo sangat terbuka dengan masyarakat lainnya baik dalam penerimaan maupun penghormatan sesama pemeluk agama. Masyarakat Gorontalo sangat cocok sebagai masyarakat yang betul-betul mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila mulai dari sila pertama sampai dengan kelima. Seperti sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa bahwa masyarakat Gorontalo taat beragama tetapi juga mereka menghormati agama lain seperti member kesempatan untuk beribadah bagi agama lain (Wawancara tanggal 12 Juli 2012)

Argumnetasi dari responden maupun para ahli bila dicermati secara seksama berdasarkan dari hasil observasi peneliti bahwa masyarakat Gorontalo memiliki tingkat keharmonisan sosial dan sekaligus kerjasama antara umat beragama yang cukup tinggi di Indonesia mengingat berbagai dimensi kehidupan keagamaan mewarnai daerah ini seperti berdirinya tempat ibadah di beberapa sudut pusat kota yang berdiri berdampingan dengan Mesjid besar Baitul Rahim, pemberian kesempatan bagi guru-guru agama untuk mengajarkan mata pelajaran agama masing-masing kepada siswa pemeluknya dan juga kerjasama lainnya. Hubungan seperti ini tentu tidak terlepas dari fungsi penting ideologi Pancasila dalam membentuk identitas kelompok bangsa sebagai pemersatu, sebagaimana secara empiris dijelaskan oleh seorang profesor yang berasal dari ilmuwan Kristen Advent yang sangat memahami pluralisme dalam masyarakat, dimana dikatakan bahwa:

Di kota Gorontalo menyatakan bahwa orang Gorontalo sangat menghargai orang lain, karena berdasarkan pengalaman saya yang sudah lama tinggal di Gorontalo bahwa orang Gorontalo menganggap saya sebagai saudara mereka dan mereka tidak membedakan suku, agama dan sebagainya. Contoh yang bisa dilihat bagaimana interaksi kehidupan kita di kampus UNG. Juga termasuk dalam skala yang lebih

luas di kota Gorontalo yang masyarakatnya heterogen dari berbagai etnis di dalamnya sangat menghargai satu sama lain. Bila dikaji secara akademis ini sangat sesuai dengan ideologi kita Pancasila terutama sila ketiga Persatuan Indonesia. Disini juga tidak pernah ada konflik dalam masyarakat (Wawancara tanggal 9 Agustus 2012).

Mengapa demikian terjadi bila dikaitkan dengan pendapat di atas, Pancasila sebagai sumber pemersatu berbagai elemen termasuk membina hubungan toleransi antara agama atau dengan kata lain ideologi (Pancasila) mempersatukan orang dari berbagai agama, dan sebaliknya juga agama berfungsi mempersatukan orang dari berbagai pandangan hidup bahkan dari berbagai ideologi. Peran nilai-nilai Pancasila sebagai pemersatu bangsa diungkapkan oleh kepala Badan KESBANGPOL kota Gorontalo Arifin Mohammad menyatakan bahwa:

Nilai-nilai Pancasila bila diamalkan oleh seluruh masyarakat, maka dapat dipastikan situasi dan kondisi kehidupan daerah khususnya di kota Gorontalo aman dan terpelihara kesatuan masyarakat daerah bahkan kesatuan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Oleh karena itu salah satu cara yang perlu dilakukan adalah menanamkan rasa cinta dan pemahaman yang sesungguhnya kepada Pancasila, menanamkan kecintaan kepada NKRI, perlunya membangkitkan dan mengefektifkan kembali kurikulum-kurikulum yang berhubungan dengan Pancasila (wawancara, tanggal 11 September 2012).

Pandangan dari kepala badan KESBANGPOL diperkuat oleh pernyataan dari Karim Yahya yang menjabat sebagai Kabid Hubungan antara Lembaga dan Politik yang mengungkapkan bahwa:

Saat ini yang paling dibutuhkan bagaimana mengaktualisasikan secara sempurna nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu perlu diadakan kembali P4 yang memiliki andil dalam memasyarakatkan nilai-nilai Pancasila terutama mulai dari tingkat pendidikan sekolah. Karena dulu sejak masuk perguruan tinggi contohnya mahasiswa sudah dibekali dengan P4, dan mereka mengetahui Pancasila tidak hanya sekedar lima sila tetapi juga bagaimana menerapkannya. Akan tetapi sekarang sangat sulit dikalangan generasi muda untuk menghayatinya

pada hal Pancasila sebagai dasar negara (wawancara tanggal 11 September 2012).

## **4.2.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Nilai Pancasila Pada Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Integrasi nasional Di Kota Gorontalo**

### **4.2.2.1 Kondisi Sosial Budaya Dalam Masyarakat Yang Terbuka**

Interaksi masyarakat kota Gorontalo cukup tinggi yang menganut paham kebersamaan dengan meminjam istilah Soepomo disebut paham integralistik dalam suasana terbuka dan demokratis tercermin konstelasi kehidupan masyarakat kota yang hidup dengan semangat kekeluargaan dan masih menunjukkan sifat kerjasama dalam hal bergotong royong dan saling menolong yang dikenal dengan istilah Huyula serta mengedepankan musyawarah. Kondisi masyarakat perkotaan yang demikian tentu sedikit kontra produktif dengan masyarakat perkotaan di daerah lainnya yang ciri utamanya adalah lebih menonjolkan individualisme. Perilaku empirik itu semuanya membentuk relasi sosial antara warga semisal tradisi gotong royong membangun rumah, tempat ibadah dan jalan. Menurut Roni Lukum MSc bahwa:

Interaksi sosial masyarakat Gorontalo sebenarnya bisa dikatakan sangat tinggi dan ini dapat dijadikan sebagai fondasi untuk pendekatan ketahanan nasional dimana masyarakat Indonesia khususnya masyarakat kota Gorontalo terkenal sangat sedikit majemuk baik itu terdiri dari orang Gorontalo sendiri, Cina, Arab dan etnis lainnya yang hidup berdampingan dan berinteraksi satu sama lain (wawancara tanggal 12 Juli 2012).

Sedangkan aspek musyawarah (*dulohupa*) terlihat pada hal-hal yang menyangkut aspek kehidupan formal maupun informal. Pada tataran formal

seperti pengambilan keputusan dalam kehidupan pemerintah di daerah yang selalu didahului oleh musyawarah, dan yang informal terbentuk pada musyawarah di desa seperti dalam bentuk rapat musyawarah untuk memutuskan tujuan bersama (*modulohupa*). Tetapi kondisi keduanya lambat laun sedang mengalami perubahan seiring dengan proses globalisasi. Namun demikian menurut Alim Niode yang menyatakan bahwa:

Aspek musyawarah atau dikenal huyula telah menjadi simbol yang dipraktekkan sejak dimasa lalu ketika Gorontalo mengenal kerajaan-kerajaan hingga kini dan hal itu telah menjadi podoman dalam berbagai aspek kehidupan baik dalam tataran sosiologis, budaya, politik. Meskipun aspek ini mulai menghilang terutama dimasyarakat perkotaan, akan tetapi pada masyarakat pedesaan prinsip ini masih kita temui dan dipraktekkan oleh masyarakat setempat (wawancara 16 Juli 2012).

Prinsip ini sebenarnya dapat membentuk solidaritas masyarakatnya dan sangat positif dalam memelihara sistem sosial masyarakat, namun dampak dari nilai-nilai yang sudah kental dalam kehidupan masyarakat tersebut cenderung melahirkan pola negatif, karena masyarakatnya cenderung paternalistik. Berdasarkan pengamatan penulis dampak negatif kondisi masyarakat seperti itu cenderung terasa dimana masyarakatnya tidak memiliki kontrol sosial yang tinggi dan cenderung pasrah melihat lingkungan sosial yang begitu buruk misalnya tiadanya pengawasan terhadap tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan dalam masyarakat dan ini melahirkan sebuah proses pemerintahan daerah yang merajalelanya praktek korupsi dan kepemimpinan kepala daerah yang sewenang-wenang.

Mengapa demikian, karena dalam realita sosial masyarakat Gorontalo terutama di daerah pedesaan bahkan juga di daerah perkotaan sangat taat dan tunduk kepada orang-orang yang dianggap tua, baik itu para tokoh masyarakat,

pemimpin agama, tokoh adat maupun para pemimpin formal baik pejabat birokrat maupun politik. Perilaku dan budaya politik yang masih tergolong *parochial* itu cenderung memunculkan adanya budaya apatis yang menghilangkan sikap kritis dan selalu tunduk pada hal-hal yang bersifat kekuasaan. Kondisi yang demikian terlihat pada berbagai kasus yang terjadi di lingkungan pemerintahan daerah terutama penyimpangan keuangan daerah yang dikenal dengan kasus korupsi yang dilakukan oleh para pejabat daerah tidak pernah dikritik oleh masyarakat. Kalaupun ada hanya sebagian kecil masyarakat yang melaporkannya kepada aparat penegak hukum yang dilaporkan oleh LSM dan itupun diselesaikan melalui upaya kekeluargaan. Meskipun solidaritas yang tinggi, tetapi sesungguhnya implementasi ideologis sangat bertautan dengan pola kehidupan masyarakat Gorontalo terutama nilai-nilai Pancasila yaitu sila persatuan Indonesia yang menjunjung tinggi solidaritas. Menurut Ahli administrasi publik yang sangat peduli dengan kehidupan masyarakat Dr. Jafar Ibrahim, MSi bahwa:

Hubungan masyarakat Gorontalo dengan masyarakat lainnya sebagai pendatang sesungguhnya sangat terbuka dan toleran bahkan sangat berlebih-lebihan, dimana hampir tidak bisa ditemukan dimanapun termasuk di kota Manado provinsi Sulawesi Utara. Sebagai contoh yang praktis saja dalam kehidupan masyarakat Gorontalo bagaimana mereka mengutamakan orang sebagai tamu yang dilayani secara sungguh-sungguh dan berlebih-lebihan, umpamanya pada hampir setiap rumah di Gorontalo pasti ada ruang khusus untuk menyambut tamu yang datang bagi siapa saja apakah itu orang Gorontalo atau tidak untuk bertamu dengan disediakan bagi mereka yang ingin menginap dengan istilah kamar tamu. Ini berarti bahwa masyarakat Gorontalo sangat menghargai orang lain tanpa membeda-bedakan agama, bahasa dan sebagainya. Kondisi seperti ini jika dikaitkan dengan penerapan nilai-nilai Pancasila secara otomatis sangat menjiwai nilai-nilai tersebut terutama kelima sila Pancasila (Wawancara tanggal 26 Agustus 2012).

Interaksi Sosial masyarakat secara umum terjalin sangat harmonis, meskipun dalam komunitas penduduk yang ada terdapat berbagai ragam minoritas

etnis pendatang yang sebagian besar berkonsentrasi di daerah perkotaan atau pusat-pusat kota kabupaten dan juga diperkampungan-perkampungan khusus. Dilihat dari konstelasi penyebaran penduduk, masyarakat Gorontalo yang merupakan etnis yang tergolong menjadi penduduk asli sebenarnya menduduki komposisi penduduk mayoritas, Kondisi sosial masyarakat Gorontalo sangat harmonis dan didukung oleh budaya yang berbasis pada nilai-nilai agama Islam yang dianut oleh mayoritas masyarakat. Meskipun dalam kehidupan sosial, interaksi penduduk Gorontalo sebagai etnis mayoritas hidup berdampingan dengan etnis minoritas atau pendatang seperti Arab, Cina, Bugis, Makasar, Jawa, Minahasa, Sangir Thalaud, Bolaang Mongondow, Jawa Tondano, Bali dan kelompok etnis lainnya. Gambaran ini dikemukakan oleh Revoltje Kaunang adalah:

Sebagai bingkai Bhineka Tunggal dimana meskipun masyarakatnya terdiri dari berbagai etnis, agama, budaya dan bahasa yang berbeda-beda, tetapi mereka tetap bersatu dan menghormati satu sama lain. Kondisi yang demikian bisa dilihat dari kehidupan masyarakat kota Gorontalo dimana ada etnis Gorontalo, etnis Jawa, Manado dan sebagainya yang hidup rukun dan damai dan saling menghormati satu sama lain, bahkan tidak ada konflik satu sama lain dan hal itu perlu ditiru oleh masyarakat lainnya di Indonesia (wawancara tanggal 12 Juli 2012).

Ikatan sosial masyarakatnya sangat mengagungkan kekeluargaan, namun paternalistik, umpamanya secara emperikal mengidolakan para pemimpin formal (pejabat, penguasa) maupun pemimpin informal (tokoh agama dan adat). Penghormatan masyarakat kepada orang yang lebih tua mirip dengan apa yang dikatakan oleh pensiunan birokrat yang mengemukakan bahwa:

Sesungguhnya budaya orang Gorontalo dimanapun di provinsi Gorontalo masih tetap menghormati orang-orang tua baik itu dalam lingkungan keluarga, maupun di luar keluarga seperti tokoh-tokoh adat dan agama, para pemimpin pemerintahan, mereka itu dianggap memiliki



akhak yang mulia dan memiliki pengetahuan agama maupun kedudukan yang tinggi, meskipun akhir-akhir ini para pemimpin pemerintahan tidak lagi dijadikan sebagai tokoh panutan dalam masyarakat karena mereka dianggap banyak membuat masalah misalnya terlibat dalam korupsi, berhianat kepada rakyat dan sebagainya (wawancara tanggal 18 Agustus 2012).

#### **4.2.2.2 Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Membangun Integrasi**

##### **Bangsa Melalui Keterwakilan Etnis Dipemerintahan**

##### **Kota Gorontalo.**

Berdasarkan perkembangan sejarah kota Gorontalo yang berdiri pada tanggal 20 Mei 1960 yang disebut kota praja Gorontalo yang kemudian berubah kotamadya dati II Gorontalo dan pada era desentralisasi atau otonomi daerah berkembang menjadi kota Gorontalo. Sesungguhnya dinamika pemerintahan atau politik lokal di kota Gorontalo sangat menarik untuk diamati, akan tetapi hal yang menarik dari percaturan itu telah membentuk integrasi bangsa yang sudah lama terbina mulai dari zaman Orde Lama, Orde Baru hingga Era Reformasi yang betul-betul menghayati nilai persatuan dari Pancasila. Meskipun pada perkembangan sejarah (diakronis) kepemimpinan berbagai elemen kekuatan politik dan etnisitas sangat terlihat untuk berkompetisi dalam rangka memperebutkan dalam proses pemilihan pucuk pimpinan eksekutif pemerintah kota Gorontalo. Fenomena ini sangat jelas merupakan polarisasi kekuatan pemerintah pusat baik yang dimulai sejak Orde Lama untuk menetralsir kekuatan daerah dengan cara menanamkan Kebhinekaan Tunggal Ika dalam rangka membangun integrasi bangsa dan melemahkan politik etnis yang berlebihan dan paham etnosentrisme yang menghingga daerah yang di dalamnya ada pluralisme yang tinggi. Tentunya strategi yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap daerah tidak terlepas dari pelaksanaan terhadap aturan normatif yang

berdasarkan pada UU No. 1 Tahun 1957 tentang otonomi daerah. (Perpu No. 6 Tahun 1959 dan Perpu No. 5 Tahun 1960)

Dengan strategis yang diterapkan oleh pemerintah pusat yang mengacu pada UU No. 1 Tahun 1957, maka ditelusuri periode pejabat pemerintah daerah baik yang direkrut langsung pemerintah pusat, DPRD daerah maupun pemilihan langsung oleh masyarakat sebagai berikut:

1). Pejabat Pemerintah Daerah Pada Masa Kepemimpinan Raden Atje Slamet (1960 – 1963)

Pelaksanaan rekrutmen terhadap Slamet menjadi pimpinan kota Gorontalo tidak terlepas strategis diatas dimana kebijakan diambil untuk mengamankan wilayah Gorontalo yang sangat dekat dengan Manado dan Minahasa yang pada masa Orde Lama melakukan perlawanan terhadap pusat. Akibatnya pemerintah pusat mengambil kebijakan untuk menempatkan perwira militer dan polisi lewat dwi fungsi ABRI untuk menempati posisi pemerintah daerah dalam rangka untuk memulihkan dan meredam potensi konflik.

Slamet yang berasal dari etnis Jawa dan berpangkat letnan kolonel polisi ditunjuk oleh pemerintah pusat untuk menjadi walikota pertama Gorontalo. Penunjukkan oleh pusat diterima oleh masyarakat Gorontalo dan hal ini adalah pengalaman pertama masyarakat kota Gorontalo dalam menerima kbhinekaan. Mengapa masyarakat Gorontalo begitu saja menerima kepemimpinan Slamet, itu tidak lain karena kondisi masyarakat Gorontalo sangat terbuka dengan etnis lain dan paham pluralisme sangat tertanam dalam masyarakatnya sebagai modal integrasi bangsa. Selai itu didukung juga oleh karena Slamet disamping pernah bertugas di Gorontalo, juga adalah orang yang menduduki jabatan mewakili etnis

Jawa yang berada di Gorontalo. Meskipun jabatan yang diduduki tidak signifikan secara politik dan administratif. Rekrutmen langsung yang dilakukan oleh pemerintah pusat tersebut tidak lain disamping untuk menormalisasikan situasi daerah akibat pemborontakan yang menjurus pada pemisahan daerah yang dilakukan oleh aktor militer Minahasa dan manado yang basis perlawanan mereka bukan hanya di daerah tersebut namun termasuk daerah gorontalo. Sekaligus juga adalah pemerintah pusat punya kepentingan untuk memantau perkembangan keamanan di daerah-daerah Indonesia timur. Di daerah lain penempatan pejabat untuk menjadi kepala daerah dipilih dari kalangan militer terutama angkatan darat terutama di daerah Kabupaten Gorontalo, Minahasa, Manado, Sangir Talaud.

Perkembangan kepentingan pusat terhadap daerah Gorontalo tidak lain disebabkan daerah ini pernah menjadi salah satu ajang perlawanan Permesta sehingga pengangkatan terhadap Slamet merupakan kehendak langsung dari pemerintah pusat untuk memonitoring masalah keamanan di kota Gorontalo yang dulunya menjadi sebagai salah satu basis perlawanan terhadap permesata, sehingga pengangkatan hanya berlangsung selama 3 tahun untuk memulihkan daerah Gorontalo tidak menjadi daerah berkembangnya kelompok-kelompok perlawanan terhadap pemerintah pusat.

Argumentasi ini diperkuat oleh Abas Nusi mantan walikota Gorontalo yang menambahkan bahwa disamping alasan untuk memulihkan keamanan, pengangkatan Slamet, meskipun merupakan kepentingan politik pemerintah pusat, namun pengangkatan tidak pernah dipersoalkan oleh para pemuka agama, adat karena dalam masyarakat ada kelompok-kelompok etnis jawa yang juga turut

berjuang dengan masyarakat Gorontalo pada masa peristiwa 23 Januari 1945 untuk pembebasan Gorontalo dari tangan penjajah.

Dukungan terhadap pengangkatan Slamet oleh masyarakat Gorontalo tidak lain Slamet adalah seorang polisi yang berasal dari Jawa dan beragama Islam namun mampu beradaptasi dengan kondisi dan budaya masyarakat Gorontalo, sehingga banyak tokoh adat, agama maupun para pejabat di Gorontalo menerima Slamet sebagai pemimpin daerah yang pertama di kota Gorontalo walaupun beliau bukan asli Gorontalo.

Argumentasi dari masyarakat dan pengamatan dari peneliti bahwa dalam masyarakat Gorontalo toleran dan sangat peduli dengan pluralisme yang dibuktikan dengan penerimaan para etnis luar yang datang ke Gorontalo dalam rangka untuk membangun kota Gorontalo termasuk menjadi pimpinan daerah di Gorontalo. Kepemimpinan Slamet selama 3 (tiga) tahun merupakan titik awal dalam membuka rekrutmen baik pejabat, pegawai di Kota Gorontalo secara terbuka sekaligus menandai adanya para pendatang khususnya Jawa untuk berkiprah dalam birokrasi pemerintah Kota Gorontalo. Oleh karena itu selama kepemimpinan Slamet banyak para pegawai yang direkrut menjadi pegawai di Kota Gorontalo dengan sangat terbuka, sekaligus beliau juga yang menata pertama kali landasan perangkat pemerintah daerah Kota Gorontalo sehingga Slamet merupakan tokoh yang sangat berjasa dalam membangun kota Gorontalo.

## 2). Pejabat Pemerintah Daerah Pada masa Kepemimpinan Taki Niode (1963-1971)

Seiring dengan mulai kondusifnya pemerintah daerah Kota Gorontalo pada periode masa jabatan di bawah kepemimpinan Slamet, maka pemerintah

pusat lewat pemerintah daerah propinsi Sulawesi Utara menuju Taki Niode seorang putra daerah untuk menjadi walikota Gorontalo. Pada masa jabatan Taki Niode, Undang-Undang otonomi yang pernah berlaku yaitu UU No. 18 Tahun 1965. meskipun UU ini ada, tetapi tidak pernah berlaku secara efektif. Terlepas dari perbedaan-perbedaan yang melekat dalam masing-masing produk politik yang menghasilkan Undang-Undang tersebut, hasilnya ada kemiripan yang mendasar diantara Undang-Undang tersebut yaitu berusaha menemukan sebuah hubungan yang ideal untuk mengadopsi hasrat sentralisme yang dikendalikan oleh pemerintah pusat yang sangat kuat maupun keinginan desentralisasi yang kuat yang dituntut oleh daerah.

Dengan adanya hubungan ideal yang dibangun oleh pemerintah pusat terhadap daerah tersebut menjadi salah satu alasan juga menempatkan Taki Niode sebagai walikota Gorontalo yang kedua memimpin kota Gorontalo. Taki Niode adalah pejabat yang sangat dekat dengan pusat dan propinsi Sulawesi Utara yang didominasi etnis Minahasa sehingga menyebabkan dia terpilih menjadi walikota kedua Gorontalo sekaligus sebagai putra Gorontalo. Modal ini menjadikannya sangat diterima disemua kalangan dan ditambah dengan sifat pluralisme yang sangat tinggi. Disamping itu Ia terkenal sebagai walikota yang sangat disiplin dan dianggap sangat jujur ukuran walikota pada waktu itu dalam menjalankan roda pemerintahan daerah.

Namun demikian karena kedisiplinannya, juga dianggap sebagai orang yang keturunan aristokrat lama yang dinilai kaku dalam menjalankan kebijakan baik dalam masalah pemerintah, kemasyarakatan dan pembangunan. Sehingga dinilai Taki merupakan walikota yang sangat terkenal dengan kedisiplinan, jujur,

tidak gampang diberi upeti namun tidak kenal kompromi dengan siapapun baik tokoh adat, agama, keluarga dan sebagainya. Namun dalam beberapa hal dia juga tidak punya visi membangun kota Gorontalo antara lain: selama periode kepemimpinannya banyak prasarana pembangunan yang dilakukan seperti sarana transportasi jalan. Pada periode masa jabatannya, jalan-jalan di Kota Gorontalo banyak yang berlubang.

Harapan masyarakat kota cukup beralasan, mengingat sentimen etnis yang membawa dampak pada politik etnis (*ethnopolitics*) mulai bertiup di Gorontalo, mengingat Kota Gorontalo merupakan salah satu propinsi Sulawesi Utara mulai mewaspadaikan gerakan politik etnis Minahasa yang mendominasi pemerintahan daerah propinsi Gorontalo. Karena sejak tahun 1963 bergabung dengan Sulawesi Utara kebijakan-kebijakan mulai terbaca berdasarkan hasil penelitian yang pernah dilakukan menunjukkan bahwa, meskipun peran pemerintah pusat, lembaga legislatif daerah, militer, kekuatan sosial politik pada waktu bisa mengatur prosedur pemilihan kepala daerah termasuk walikota Gorontalo namun ada faktor lain menentukan terpilihnya tidaknya putra daerah untuk memimpin Gorontalo yaitu faktor konstelasi politik lokal Minahasa yang selalu membanggakan etnosentrisme yang berbasis etnis (Sastro Wantu, 1994, h. 260). Sehingga terpilihnya Niode ke puncak kepemimpinan kota Gorontalo disamping melalui prosedur yang ada tetapi harus mendapat dukungan pusat dan restu dari politik etnis Minahasa, menyebabkan Ia bisa memegang jabatan 8 (delapan) tahun sebagai walikota Gorontalo. Pada masa kepemimpinannya intergrasi bangsa sangat diutamakan karena Ia memiliki hubungan yang baik dengan berbagai etnis dan sangat peduli dengan toleransi dimasyarakat kota Gorontalo.

### 3). Pejabat Pemerintah Daerah Pada Masa Kepemimpinan Yusuf Bilongatu (1971-1977)

Pada era kepemimpinan Bilongatu, muncul pada waktu itu kekuatan sosial politik dan militer sangat kuat sehingga prosedur pemilihan walikota sangat ditentukan oleh lembaga ini, apalagi Indonesia melaksanakan pemilu pertama dizaman orde baru. Untuk itu pemerintah rezim Soeharto sangat berkepentingan untuk menentukan siapa yang menjadi pimpinan daerah dalam rangka mengamankan kekuasaannya dan program pembangunannya. Militer dan Golkar sebagai institusi dan pasti pendukung pemerintah secara konvensional merupakan penentu dalam hal militer berhasil tidaknya suatu sistem demokrasi yang sedang dibangun oleh Orde Baru pada waktu itu. Salah satu aspek penilaiannya adalah dinamika pergantian elit atau pimpinan pemerintah maupun politik termasuk pemerintah daerah Gorontalo.

Sedangkan dengan pembangunan ekonomi yang mengarah pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan politik yang menitikberatkan pada stabilitas politik menyebabkan pula rekrutmen pejabat daerah diarahkan pada pencapaian dua hal. Untuk maksud ini, Golkar sebagai partai yang baru ikut pemilu dan dominan yang beranggotakan teknokrat, intelegensi dan pegawai negara memperoleh dukungan dari ABRI. Dengan demikian rekrutmen pejabat sangat ditentukan oleh kaderisasi dalam Golkar dan ABRI.

Hasil penelitian menunjukkan hal sama bahkan pemilihan pejabat pemerintah daerah walikota Gorontalo sebagai suatu rangkaian dari sistem pusat sampai di daerah menjalankan fungsinya sesuai instruksi pusat. Seluruh eksekutif di Gorontalo adalah kader Golkar. Penentuan walikota Gorontalo pun ditentukan

oleh hal itu sehingga muncullah Bilondatu yang berasal dari militer menjadi walikota Gorontalo. Karena kenyataannya Golkar di Gorontalo sejak tahun 1971 mengajukan calon-calon dari ABRI, tetapi putra daerah termasuk pengajuan terhadap Bilondatu yang diusung oleh Golkar dari jalur militer. Munculnya Bilondatu yang direkrut dari militer merupakan kebijakan pusat lewat Golkar propinsi Sulawesi Utara untuk memimpin daerah kota Gorontalo sehingga siapapun harus sepakat menerima penempatan Bilondatu karena hanya dia yang diinginkan oleh Golkar untuk mengamankan situasi kota Gorontalo yang melaksanakan pemilihan umum tahun 1971.

Bahkan diprediksi pada waktu itu Golkar di Gorontalo kalau bersaing dengan Partai Persatuan Pembangunan yang mendapat simpati luar biasa dari masyarakat Gorontalo yang mayoritas beragama Islam dan menganggap PPP harus dipilih karena berkaitan dengan lambang Ka'bah kebanggaan kaum muslim Gorontalo. Oleh karena itu perekrutan seorang Bilondatu yang berlatar belakang militer adalah dalam rangka untuk mengamankan Golkar di daerah ini sekaligus menarik simpati kalangan muslim bahwa walikotanya orang Gorontalo militer sebagai pendukung Golkar.

Perekrutan terhadap Bilondatu sebagaimana telah dijelaskan diatas, juga dimaksudkan untuk kepentingan politik nasional yang ingin melakukan fusi partai politik yang dulunya 10 partai ikut pemilihan tahun 1971 kemudian pada tahun 1974 dilakukan fusi partai yang tinggal 3 (tiga) partai, yaitu Golkar, PPP dan PDI yang akan ikut pemilihan 1977. Kebijakan yang diambil oleh pusat untuk mempertahankan militer sebagai walikota dimaksudkan untuk mengamankan kebijakan pusat yang khawatir terhadap Golkar di kota Gorontalo yang akan



menghadapi massa PPP yang begitu banyak. Pada waktu simpatisan PPP sangat besar karena peran dari Muhammad Gobel sebagai pengusaha nasional yang merupakan putera dari Gorontalo sekaligus kader dari PPP. Mengingat bahwa fanatisme masyarakat Gorontalo terhadap PPP menyebabkan Bilondatu tetap dipertahankan oleh Golkar untuk membendung kebesaran PPP di kota Gorontalo. Meskipun demikian kesuksesan Bilondatu tidak hanya dalam soal membangun kekuatan Golkar tetapi juga dalam hal membina hubungan keharmonisan di antara berbagai kelompok masyarakat yang ada di kota Gorontalo. Sehingga pada masa kepemimpinannya integrasi antara etnis di daerah ini begitu kondusif dan toleran, saling menghargai antara satu dengan yang lain.

#### 4). Pejabat Pemerintah Daerah Pada Masa Abas Nusi (1977 – 1982)

Perjalanan pemerintah lokal di Gorontalo tetap masih dikendalikan dari pemerintah pusat lewat propinsi Sulawesi Utara, dimana kesuksesan seorang militer Bilondatu yang membawa Golkar menang pemilu 1977 menyebabkan pemerintah propinsi Gorontalo mencabut lagi dari jalur birokrat sebagai pendukung Golkar. Nusi yang mengawasi karir pemerintah dari pegawai negeri sampai jenjang walikota hingga wakil gubernur Sulawesi Utara sangat dekat dengan etnis Minahasa.

Rekrutmen terhadap Nusi tidak lain dijadikan sebagai kekuatan politik Sulawesi Utara untuk membendung laju para elit Gorontalo yang masuk bursa walikota Gorontalo. Nusi meskipun seorang yang masih ada darah keturunan Cina, hidup dan punya famili Gorontalo serta beragama Islam dianggap sebagai kekuatan netral. Pada awalnya perlawanan terhadap direkrutnya Nusi sebagai walikota mendapat kritik dari kalangan masyarakat karena Nusi sangat dekat

dengan Manado dan paling lama berkarir di Manado juga adalah seorang keturunan etnis Cina. Kecenderungan seperti ini menurut Alim Niode tidak lain bahwa proses rekrutmen yang dilakukan oleh pemerintah dari Sulawesi Utara pada waktu Nusi sebagai walikota merupakan rekayasa Manado untuk membendung para pejabat maupun politisi Golkar di daerah untuk dipilih oleh DPRD kota Gorontalo. Legislatif tidak bisa menolak pencalonan ini karena sudah dikomando dari Manado untuk memilih Nusi dan sekaligus dijadikan sebagai figur untuk membendung kekuatan elit lain Gorontalo yang dikhawatirkan seperti munculnya Liputo.

Pada masa kepemimpinan Nusi, pemerintah daerah kota Gorontalo mengalami perkembangan cukup pesat dan penataan kelembagaan pemerintah daerah. Rekrutmen pejabat yang dilakukan oleh Nusi didasarkan pada aturan normatif dan sedikitnya menunjukkan sistem merit sehingga banyak pegawai sesuai dengan kompetensi masing-masing. Bahkan Nusi terkenal juga sebagai pejabat yang memiliki disiplin yang tinggi kepada pegawainya sehingga banyak yang tidak setuju dengan kebijakan-kebijakannya dan berupaya untuk menggoyang pemerintahannya. Upaya tersebut tidak berhasil karena Nusi dinilai cukup berhasil dan ia sangat dekat dengan pemerintah propinsi Sulawesi Utara yang sesungguhnya sangat berkepentingan menjaga hubungan berbagai kepentingan etnis dalam masyarakat.

##### 5). Pejabat Pemerintah Daerah Masa Kepemimpinan Nadjamuddin (1982 – 1987)

Nadjamudin adalah putra Gorontalo yang mengawali karirnya sebagai seorang guru, kemudian memantapkan karirnya didepartemen pendidikan dan kebudayaan propinsi Sulawesi Utara. Ia termasuk orang yang paling dipercayai

oleh Sulawesi Utara karena memiliki kharisma dikalangan elit pejabat, politik maupun dimasyarakat Gorontalo.

Oleh karena pembawaannya tersebut, maka Nadjamuddin dirangkul oleh pejabat Sulawesi Utara untuk meredam perlawanan para elit politik lokal Gorontalo yang sering menentang kebijakan dari elit propinsi yang secara tidaklah langsung kental dengan politik etnis. Perlawanan-perlawanan yang bersifat laten dari elit Gorontalo terutama datang dari kolonel Angkatan Udara Martin Liputo yang memiliki basis dukungan dari besannya yang pernah menjadi kepala rumah tangga presiden dan juga sebagai ketua PSSI pada waktu itu yaitu Kardono. Perseteruan antara Martin Liputo dan gubernur Rantung sangat kental dengan politik etnis sehingga Nadjamuddin adalah tokoh yang disegani di Gorontalo ditempatkan menjadi walikota Gorontalo untuk meredam dan melindungi perseteruan dan sekaligus untuk memelihara kesetiaan Gorontalo pada Sulawesi Utara.

Pada mas kepemimpinan Nadjamuddin, rekrutmen pejabat dinilai sangat baik sama dengan masa Nusi karena para pejabat meniti karir sesuai dengan perjenjangan dan sekaligus Nadjamuddin sangat memperhatikan kompetensi pejabat yang direkrutnya karena dengan kemampuan dan pengalaman sebagai tenaga pendidik, maka dia sangat memperhatikan faktor kompetensi dari para pejabat maupun pegawai yang menjadi bawahannya.

#### 6). Pejabat Pemerintah Masa Kepemimpinan Joesoef Dalie (1987 – 1993)

Dalie adalah orang Gorontalo yang mengawali karirnya di departemen Pekerjaan Umum (PU) di Jakarta dan ditunjuk menjadi walikota Gorontalo menggantikan Nadjamuddin. Terpilihnya Dalie menjadi pimpinan daerah di kota

Gorontalo diindikasikan adalah permainan politik pusat yang dimainkan oleh orang-orang Gorontalo yang sukses di Jakarta untuk mengimbangi dominasi etnis Minahasa dalam memainkan politik Gorontalo termasuk di dalam rivalitas Sulawesi Utara dengan Liputo.

Seperti pendahulunya, dalam rekrutmen pejabat Dalie sangat memperhatikan faktor kompetensi dan spesialisasi para pegawai dan pejabat di kota Gorontalo. Karena kebijakannya itulah banyak para pejabat maupun elit Gorontalo yang selama ini diangkat sedikitnya atas pertimbangan politis termarginalkan dalam jabatannya sehingga dalam kepemimpinannya di daerah Gorontalo, Dalie menghadapi konflik-konflik internal para pejabat dan tekanan dari politik Sulawesi Utara. Para pejabat Sulawesi Utara menganggap Dalie sulit dikendalikan dan diajak untuk kompromi. Banyak kebijakan-kebijakan misalnya dalam penempatan pejabat, kebijakan pembangunan dan sebagainya tidak dikonsultasikan dengan Sulawesi Utara.

#### 7). Pejabat Pemerintah Masa Kepemimpinan Ahmad Arbie (1987 – 1993)

Pengangkatan Arbie sebagai walikota Gorontalo merupakan keputusan yang mengejutkan bagi kalangan masyarakat maupun pejabat politisi Gorontalo. Arbie yang berasal dari etnis Jawa Tondano mengawali karir di bank Sulut kemudian menjadi direktur bank sulut sangat dekat dengan gubernur Rantung. Direkrutnya Arbie tidak terlepas dari kekecewaan Rantung terhadap Dalie yang sulit dikendalikan kebijakannya dan akhirnya ia mengangkat orang yang sangat dipercayainya. Pengangkatan yang pada waktu dinilai sebagai gubernur yang paling kuat di Sulawesi Utara karena sangat dekat dengan panglima ABRI pada waktu itu Tri Sutrisno. Banyak lawan-lawan politiknya baik di Sulawesi Utara

maupun di Gorontalo takut menghadapi kekuasaan yang sangat besar dari orang kuat ini.

Dalam menjalankan kebijakannya, Arbie banyak merekrut orang-orang kepercayaannya atas restu politik Sulawesi Utara dengan cara merekrut orang-orang Gorontalo untuk menjadi pejabat pembantunya termasuk juga pejabat-pejabat dari luar etnis Gorontalo. Meskipun Arbie dinilai oleh kalangan tidak terlalu menjalankan kebijakan politik etnis, tetapi kebijakan-kebijakan lain dalam pemerintah dianggap banyak tidak berhasil. Kondisi ini tidak terlepas dari kesehatannya yang seringkali sakit dan akhirnya meninggal dunia.

Sehingga karena masa jabatannya belum berakhir, maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1995 pasal 33 ayat 5 dan 2 yang selanjutnya sesuai surat penunjukkan 136/01/463 tanggal 8 Desember 1997 dan SK GKDH nomor 15/1998 tanggal 26 Januari. Azis Isa sebagai Sekwilda kota Gorontalo ditunjuk sebagai pelaksana tugas sehari-hari WKDH tingkat II Gorontalo terhitung sejak tanggal 8 Desember 1997 sampai dengan dilantiknya pejabat definitif pada tanggal 8 Juni 1998.

#### 8). Pejabat Pemerintah Masa Kepemimpinan Medi Botutihe (1998 – 2008)

Munculnya Botutihe sebagai walikota yang berasal dari kelompok keturunan aristokrat lama merupakan hasil dari pilihan murni dari anggota DPRD kota Gorontalo dan tidak ada lagi intervensi politik lokal dari Sulawesi Utara. Pada masa itu pemerintah pusat mulai menghadapi krisis ekonomi, politik dan kepercayaan berdampak pada perlawanan daerah-daerah di Indonesia. Tidak terkecuali daerah Gorontalo yang mulai mempersiapkan diri untuk memekarkan diri menjadi propinsi Gorontalo. Krisis nasional dan perlawanan Gorontalo yang

berbasis pada perjuangan politik etnis menyebabkan Sulawesi Utara tidak terlalu berambisi lagi untuk mencampuri politik lokal Gorontalo sehingga terpilihnya Botutihe murni pilihan rakyat lewat DPRD daerah.

Pada masa kepemimpinan Botutihe selama 2 (dua) periode, kebijakan tentang pemerintah daerah termasuk dalam penataan kelembagaan birokrasi daerah yang selalu didengungkan. Dengan reformasi birokrasi selalu diabaikan dan lebih banyak diwarnai oleh birokrasi yang kental dengan permainan politik dan kekuasaan. Dalam proses rekrutmen pejabat warna politik dan kekuasaan sangat kental. Hal ini bisa dilihat dari berbagai penempatan pejabat baik di eselon II maupun eselon III.

Disamping itu, kebijakan lain yang dilakukan oleh Botutihe mirip apa yang terdapat dalam model *representative bureaucracy* adalah merekrut para pejabat dari etnis lain seperti Sekda Kota dan Kepala Dinas Pertanian (istrinya wakil gubernur Gusnar) dari Bolaang Mongondow, pejabat LLAJR dari Minahasa dan sebagainya untuk mengisi jabatan dalam birokrasi lokal. Kebijakan ini bisa dipahami sebagai bentuk dari implementasi dari multikultural dalam dirinya karena istrinya adalah berasal dari etnis Jawa Tondano sehingga dalam kebijakannya sangat memperhatikan aspek pluralisme dalam masyarakat.

9). Pejabat Pemerintah Daerah Masa Kepemimpinan Adhan Dambea (2008 – 2013)

Dengan UU Nomor 32 Tahun 2008 tentang pemerintah daerah, dimana pimpinan daerah harus dipilih langsung oleh rakyat, maka berdasarkan hasil Pilkada pada tahun 2008, Dambea terpilih menjadi walikota Gorontalo. Meskipun pemilihan itu mengalami kontroversi yang cukup besar dikalangan komisi

pemilihan umum daerah dan masyarakat, tetapi pada akhirnya Dambea dilantik menjadi walikota Gorontalo yang ke-9.

Melihat kebijakannya tentang penataan kelembagaan pemerintahan tentunya mirip dengan pendahulunya Botutihe, dimana birokrasi daerah menjadi arena politik dan kekuasaannya. Birokrasi daerah kota Gorontalo sangat jauh dari birokrasi yang rasional. Tidak jarang para pegawai dan pejabat dimobilisir untuk kepentingan politiknya partai dan Organisasi Kemasyarakatan (Nasdem). Bahkan ditakut-takuti untuk menciptakan loyalitas di daerah, menurut beberapa kalangan banyak pejabat dan pegawai takut dengan gaya kepemimpinan yang berasal dari orang kuat lokal yang mampu memiliki kontrol pada masyarakat termasuk kepada preman sekalipun. Perilaku kepemimpinannya pada satu sisi didambakan oleh masyarakat karena keberaniannya mengambil kebijakan dalam menertibkan pemerintahan kota sebagaimana dikatakan oleh salah seorang masyarakat bahwa Adhan sebagai walikota meskipun sangat dibenci orang namun saya anggap sudah berbuat banyak terutama kemampuannya dalam memberantas kemaksiatan, minuman keras, penertiban pasar dan pedagang kaki lima, pembuatan saluran banjir yang hampir setiap saat melanda kota Gorontalo yang sesungguhnya kebijakannya tidak pernah dilakukan oleh pemimpin sebelumnya.

#### **4.2.3 Model Empiris (*Exiting Model*) Implementasi Nilai-Nilai Pancasila**

Dalam model empiris akan dipetakan berbagai permasalahan tentang kelemahan-kelemahan implementasi nilai-nilai Pancasila pada masyarakat lokal yang mulai mengalami erosi terutama dalam pemahaman empat pilar bangsa antara lain Pancasila dan juga juga adanya dinamika Gobalisasi dan Liberalisasi

yang menggoda sekaligus merusak tatanan masyarakat di negara berkembang termasuk Indonesia serta tidak terkecuali masyarakat kota Gorontalo.

Adanya pengikisan nilai-nilai pilar kebangsaan dan munculnya budaya Globalisasi, Liberalisme yang merasuki hampir semua tatanan masyarakat termasuk generasi muda menyebabkan bencana yang bisa meruntuhkan integritas maupun integrasi nasional. Karena sejak tahun 1998 reformasi bergulir dengan standar demokratisasi yang berlebih-lebihan atau eforia melahirkan kegaduhan dan kebisingan dalam kehidupan nasional yang cenderung melahirkan konflik dan kekerasan dalam masyarakat. Sehingga nilai-nilai kebangsaan yang menjadi podoman dalam kehidupan bermasyarakat bernegara dan berbangsa sudah mulai terpinggirkan. Contoh kasus bagaimana akhir-akhir ini kehidupan masyarakat kota Gorontalo yang terkenal sangat terbuka, saling menghormati, taat beragama, toleran dan santun dapat terseret pada berbagai konflik kepentingan politik misalnya kejadian penikaman ketua DPRD kota Gorontalo oleh masyarakat dan berbagai kasus lainnya yang tentunya mengganggu integrasi nasional yang harus kita bina bersama.

Dengan pemetaan model empiris diharapkan menjadi podoman atau standar dalam merekonstruksi kembali sebuah model rekomendasi (*recommended model*) implementasi nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat lokal sehingga mampu memberikan dampak yang positif bagi kepentingan untuk melestarikan nilai-nilai kebangsaan yang bersumber pada pilar kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Namun demikian berdasarkan berbagai data empiris bahwa implementasi nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat kota Gorontalo masih perlu ditingkatkan



lagi pemahaman dan pelaksanaannya terutama menyangkut permasalahan yang perlu ditata kembali baik yang berkaitan dengan bagaimana mengaktualisasikan Pancasila tidak hanya sekedar mengetahui dan menghafal sila-sila Pancasila tetapi yang utama juga adalah bagaimana menghayati dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu ditingkatkan lagi landasan pendidikan kewarganegaraan, pendidikan Pancasila yang seharusnya diajarkan secara intensif mulai dari pendidikan dini baik sekolah dasar, hingga perguruan tinggi terutam di kota Gorontalo. Karena pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dapat memberikan pemahaman nilai-nilai kebangsaan bagi masyarakat kota agar supaya menghindari kekhawatiran berbagai potensi konflik dan kekerasan di masyarakat sekaligus juga sebagai usaha mempersiapkan kewaspadaan nasional yang berpotensi melahirkan disintegrasi nasional. Selanjutnya karena masyarakat kota Gorontalo yang terbuka terhadap berbagai kehidupan sosial tentu perlu meningkatkan lagi adanya sebuah birokrasi pemerintahan yang lebih memperhatikan berbagai keberagaman sosial dalam masyarakat baik didasarkan pada etnis, agama, bahasa dan sebagainya.

#### **4.3. Analisis Pembahasan**

##### **4.3.1 Implementasi Nilai Pancasila Pada Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Integrasi nasional Di Kota Gorontalo**

Pancasila sebagai ideologi nasional dijadikan sebuah rangkaian konsensus nasional dalam berbagai bidang dalam arti konsolidasi dalam menghadapi segala macam tantangan baik bersifat ekonomi, politik, sosial dan budaya. Konsolidasi sangat berakar dari nilai-nilai dasar yang terangkai dan menjadi satu dalam sebuah sistem. Mengapa demikian karena nilai-nilai dasar Pancasila bersumber dari

budaya dan pengalaman sejarah suatu masyarakat atau bangsa yang menciptakan ideologi itu. Dengan kata lain perkataan, nilai-nilai dasar berakar dan hidup dalam realita kehidupan terutama pada saat mereka berkonsensus untuk menjadikannya menjadi ideologi bersama.

Pancasila sebagai konsensus nasional untuk menjadikannya sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, secara teoritikal mirip dengan apa yang dikemukakan oleh Shills (dalam Moerdiono, 1991, h.383) bahwa untuk mewujudkan itu diperlukan beberapa parameter sebagai berikut: (1). Adanya tarap konsensus yang tinggi mengenai nilai-nilai sosial bersama yang hendak diwujudkan itu. Tanpa konsensus jelas tidak mungkin ada ketertiban yang mantap; (2). Pembedaan yang jelas antara nilai dan norma yang melaksanakannya, agar pelanggaran norma dalam kenyataan tidak sekaligus sebagai pelanggaran nilai, yang mendasarinya; (3). Relatif tidak adanya perpecahan dan kesenjangan di antara golongan yang ada dalam masyarakat; (4). Adanya stabilitas pola kelembagaan untuk proses legislatif yang menjabarkan norma-norma itu dalam peraturan perundang-undangan yang mengikat seluruh warga masyarakat secara adil; (5). Akhirnya, adanya stabilitas pola kelembagaan untuk menampilkan keluhan serta menyelesaikan masalah yang melatarbelakanginya.

Selanjutnya Shills (dalam Bahar, 1992) mengurai kaitan ideologi yang bisa saja untuk melihat relevansinya dengan ideologi Pancasila yang dapat mengikat (integrasi) para penganutnya dan berkisar pada satu nilai dasar sebagai inti. Pandangan Shills itu sifatnya komprehensif dan mencakup Sembilan ciri yaitu rumusannya lugas; terintegrasi secara disekitar satu kepercayaan moral atau

kognitif; mengakui kaitannya dengan pola masa lampau dan sekarang; menutup masuknya unsur baru atau variasi baru; keharusan untuk melaksanakannya dalam sikap, perilaku dan perbuatan penganutnya; adanya rasa senang kepada ideologi itu; adanya konsensus dari semua pengikutnya; diundangkan secara legal dan dihubungkan dengan satu badan yang didirikan untuk menegakkan pola kepercayaan itu.

Dalam tataran teoritis yang yang dikemukakan berdasarkan jalan pikiran dari Shills yang berkaitan dengan ideologi dijadikan sebagai dasar legalitas tersebut, sesungguhnya sangat tepat mengingat bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia dibingkai oleh sebuah ideologi negara yang dinamakan Pancasila yang dianggap sebagai ideologi yang menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan negara. Dalam kaitannya dengan hal ini dalam skala normatif berdasarkan penjelasan Undang-Undang dasar 1945 ditanamkan oleh Soepomo sebagai ahli hukum yang menanamkan semangat kekeluargaan dalam penyusunan Undang-Undang Dasar dalam rumusannya sebagai berikut:

”Yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hal hidupnya negara ialah semangat para penyelenggara negara, semangat para pemimpin pemerintahan. Meskipun dibuat Undang-Undang Dasar yang menurut kata-katanya bersifat kekeluargaan, apabila semangat para penyelenggara negara, para pemimpin pemerintahan itu bersifat perorangan, Undang-Undang Dasar itu tentu tidak ada artinya. Sebaliknya, meskipun Undang-Undang Dasar itu itu tidak sempurna akan tetapi jikalau semangat para penyelenggara pemerintahan baik, Undang-Undang Dasar itu tentu tidak akan merintang jalannya negara. Jadi yang paling penting semangat, maka semangat itu hidup atau dengan lain perkataan dinamis.

Berhubungan dengan itu hanya aturan-aturan saja yang harus ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar, sedangkan hal-hal yang perlu untuk menyelenggarakan aturan-aturan pokok itu harus diserahkan kepada undang-undang (Moerdiono, 1992, h.378). Dari pandangan ini Undang-Undang Dasar 1945 memberi kepercayaan yang sangat besar kepada semangat kekeluargaan. Hal ini mencerminkan nilai kultural yang terdapat dalam seluruh kebudayaan rakyat Indonesia di daerah-daerah dan merupakan salah satu rahasia kekuatan Undang-Undang dasar 1945 serta Pancasila yang menjiwainya.

Oleh karena itu aspek hukum sebagai produk negara tidak terlepas dari filsafat negaranya, artinya filsafat hukum tidak dapat dilepaskan dari pemikiran filsafati dari negaranya (Wiyono, 2010). Untuk memperkuat argumentasi ini Noor Syam (2000) memberikan dasar pemikiran bahwa posisi Pancasila sebagai filsafat negara terhadap sistem hukum, dimana filsafat hukum harus berdasar pada ide dasar yang ada dalam Pancasila. Selanjutnya aturan hukum yang dibentukpun harus berdasarkan pula pada pemikiran filsafat hukumnya yang mengacu pada ide dasar Pancasila.

Karenanya menurut Harkrisnowo (2002) yang mengutip pemikiran dari Hamid Attamimi bahwa dilihat dari perspektif hukum kelima asas negara memiliki fungsi konstitutif dan regulatif. Fungsi konstitutif yakni yang menentukandasar suatu tata hukum dan memberikan arti dan makna sebagai hukum. Sudah amat jelas bahwa dengan mengacu kepada fungsi ini, maka dalam setiap proses perumusan ketentuan perundang-undangan, para perumus harus selalu menjadikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai acuannya. Berdasarkan fungsi ini dipinjam konsep dari Roscoe Pound yang memberi

kemungkinan bagi hukum untuk berfungsi antara lain: (a). *As a tool of social engineering*; (b). *As a dispute resolution mechanism*; (c). *As a social control mechanism*.

Karena itu filsafat hukum Pancasila diterima dalam konsepsi pemikiran hukum dan dijadikan sebagai landasan normatif pembentukan dan pelaksanaan hukum. Berkaitan dengan hal itu Mahfud MD (Wiyono, 2010) mengemukakan dalam pembentukan negara hukum, maka Pancasila harus melahirkan kaidah-kaidah penuntun dalam pembuatan politik hukum atau kebijakan negara lainnya yaitu: (1). Kebijakan umum dan politik hukum harus tetap menjaga integrasi atau keutuhan bangsa baik secara ideologi maupun secara teritori; (2). Kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada upaya membangun demokrasi (kedaulatan rakyat) dan nomokrasi (negara hukum); (3). Kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada upaya membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; (4). Kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada prinsip toleransi beragama yang berkeadaban.

Ideologi mempunyai manfaat dan sifatnya komprehensif dan konsisten dan mampu member jawaban yang mantap terhadap pertanyaan tentang berbagai masalah. Karena itu ideologi tidak boleh menutup diri terhadap segala bentuk sistim nilai. Selain itu ideologi tidak bisa kaku dan harus toleran dengan dengan pihak lain. Untuk itu kita membutuhkan ideologi Pancasila yang bisa memandang segala perkembangan negara republik Indonesia yang begitu pluralisme yang sangat mendambakan kesatuan dalam keberagaman sosial dengan formulasi menghormati dan sekaligus mengakui nilai budaya, agama, etnis yang ada diberbagai daerah.

Dalam dimensi nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari empat pilar yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki keterkaitan erat dengan ide pembangunan politik yang menekankan pada perlunya integrasi yang menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial ke dalam satu kesatuan wilayah. Artinya integrasi mengandalkan adanya suatu masyarakat yang secara etnis majemuk yang masing-masing kelompok masyarakat dan sifat kebudayaannya sendiri-sendiri. Dalam sebuah pembangunan politik dan sistim politik integrasi bangsa khususnya mengarah pada bagaimana membangun suatu rasa kebangsaan dalam suatu daerah dengan menghapus kesetiaan-kestiaan politik yang sempit.

Oleh karena itu dalam rangka untuk mencapai hal yang demikian kebijakan pemerintah dalam membangun kebangsaan harus memperhatikan berbagai parameter antara lain: (1). Penghapusan sifat-sifat kulturil utama dari komuniti-komuniti minoritas yang berbeda menjadi semacam kebudayaan nasional yang biasanya kebudayaan dari kelompok budaya yang dominan melahirkan kebijakan asimilasi; (2). Penciptaan kesetiaan nasional tanpa menghapuskan kebudayaan-kebudayaan kecil yaitu disebut kebijakan Bhinneka Tunggal Ika (Myron, 1982, h.44). Akan tetapi dalam prakteknya dilihat dari pembangunan politik dan sistim politik jarang begitu saja mengikuti salah satu strategi itu, tetapi biasanya menjalankan kebijaksanaan strategi yang berkisar diantara keduanya, atau kadang-kadang dengan mencampurkan beberapa unsur dari kedua strategi pokok itu. Mengacu pada persoalan kebangsaan Indonesia berdasarkan pada perjalanan panjang, maka tentu sebagai bangsa yang besar di atas, harusnya belajar suatu konstruksi pembangunan politik yang sesungguhnya

memperhatikan secara serius unsur kebhinekaan sebagai fondasi yang bisa menahan erosi bangsa yang cenderung mengancam integrasi bangsa.

Berdasarkan pemikiran tersebut bagi masyarakat yang relatif homogen mengatasi masalah integrasi nasional tidaklah begitu sulit, namun halnya dengan masyarakat yang bersifat heterogen. Weiner (1988, h. 551) mengajukan strategi yang ditempuh oleh suatu negara yaitu asimilasi dan persatuan dalam keanekaragaman (bagi Indonesia identik dengan Bhinneka Tunggal Ika. Menurut Weiner asimilasi adalah pencapaian integrasi dengan menjadikan kebudayaan suku yang dominan dalam suatu negara sebagai kebudayaan nasional. Hal ini dapat dicapai dengan jalan menundukkan identitas suku atau golongan minoritas kepada kebudayaan suku yang dominan. Sementara persatuan dalam keanekaragaman atau Bhinneka Tunggal Ika diartikan sebagai usaha untuk membentuk kesetiaan nasional yang dilakukan dengan tidak menghilangkan kebudayaan kelompok-kelompok minoritas.

Konsep Weiner mirip dengan karya Coleman dan Rosberg (dalam Sjamsuddin, 1997, h. 4) yang menyatakan bahwa integrasi nasional adalah proses pemersatuan bangsa disuatu negara yang terdiri atas dua dimensi yaitu integrasi vertikal dan horizontal. Integrasi vertikal mencakup masalah-masalah yang bertujuan menjembatani celah perbedaan yang mungkin ada antara kaum elit dan massa dalam rangka pengembangan proses politik terpadu dan masyarakat politik yang berpartisipasi. Sedangkan integrasi horizontal bertujuan untuk mengurangi diskontinuitas dan ketegangan kultural kedaerahan dalam rangkas proses penciptaan suatu masyarakat politik yang homogen. Sementara Ake (1987, h. 13) menguraikan integrasi nasional dari sudut tautologis dimana istilah bangsa

(*nation*) yang menjadi akar kata nasional itu secara normatif sudah mengandung makna kelompok manusia yang sangat terpadu. Dengan demikian istilah bangsa sudah dengan sendirinya merujuk pada integrasi karena komponen-komponenya memang sudah terintegrasi.

Pendekatan dari pemikiran Myron yang menggambarkan Bhinneka Tunggal Ika secara empirikal sedikitnya terlihat dalam masyarakat kota Gorontalo yang sedikit heterogen dimana struktur masyarakat kota Gorontalo berdasarkan pembilahan etnis antara para pendatang maupun penduduk asli yaitu kelompok etnis Gorontalo sebagai penduduk mayoritas pada umumnya bermukim di seluruh wilayah Gorontalo, Etnis Arab, Cina dan Bugis-Makasar dan Jawa, Minahasa, Sangir Thalaud, Bolaang Mongondow dan sejumlah etnis lainnya.

Meskipun menurut Nazaruddin bahwa penerapan strategi nasional di negara-negara multietnis seperti Indonesia akan cenderung meningkatkan ketegangan kultural dan regional. Dalam kondisi seperti itu strategi yang demikian lebih banyak menampilkan ancaman terhadap integrasi meskipun tidak setiap saat ia muncul ke permukaan dari pada mempercepat proses itu (dalam Maridjan, 1989, h.118). Indonesia di samping berupaya melakukan proses integrasi terutama pemerintahan Orde Baru telah membuat kebijakan politik yang berupa *force* dengan meminjam istilahnya Nasikun yang memungkinkan bagi cepatnya proses integrasi. Kebijakan agar Pancasila diterima sebagai satu-satunya asas bila dipahami sebagai *force*. Dilain pihak pemerintah juga membuat kebijakan yang memungkinkan berkurangnya potensi sumber disintegrasi agar tidak teraktualisasi ke permukaan. Larangan memperbincangkan dan mempermasalahkan sara



merupakan contoh yang paling tepat untuk ini. Orang-orang atau kelompok-kelompok yang melanggarnya bisa dikategorikan subversi (Maridjan, 1989).

Meskipun masyarakat Gorontalo sangat yang terdiri dari etnis mayoritas Gorontalo dan etnis pendatang sebagai minoritas saling terintegrasi dengan baik, namun dalam interaksi sosial pernah terjadi ketegangan sosial pada tahun 1990-an akibat dari pembilahan sosial dan kesenjangan sosial antara pendatang dan penduduk setempat yang dipicu oleh peristiwa ketersinggungan dari masyarakat kota dari peristiwa pelecehanan suatu agama tertentu oleh salah seorang oknum yang kebetulan berasal dari etnis minoritas, sehingga terjadi pengrusakan beberapa tokoh yang kebetulan milik dari etnis tertentu. Meskipun konflik yang termanifestasi tersebut hanya berskala kecil dan mampu diselesaikan oleh pemerintah kota Gorontalo, namun ketegangan ini tetap menjadi persoalan dalam membangun integrasi nasional yang berbasis pada kebhinnekaan di Indonesia termasuk di tingkat lokal. Gambaran ini sesuai dengan pandangan Judit Nagata (dalam Sastro Wantu, 1992) yang menyatakan bahwa stratifikasi sosial muncul ketika persepsi lokal (daerah) mengenai masyarakat dan konflik sosial seringkali muncul dan diungkapkan dalam idiom etnis.

Karena itu Pancasila sebagai etos budaya diarahkan bagaimana melaksanakan pembangunan bangsa antara lain pembangunan kebudayaan sebagai sarana pengikat persatuan dan kesatuan dalam masyarakat majemuk. Bhinneka Tunggal Ika dan pelaksanaan amanat UUD 1945 yang berkaitan dengan pembangunan kebudayaan bangsa tidak bisa diabaikan. Di Era Reformasi kedudukan kebudayaan sebagai landasan kemajemukan dan keanekaragaman masyarakat. Untuk itu setiap bangsa tidak terkecuali bangsa Indonesia atau dalam

lokus yang lebih kecil kota Gorontalo sangat membutuhkan kebudayaan nasional sebagai landasan atau media sosial yang memperkuat persatuan. Seperti yang dikemukakan oleh

Hamengku Buwono bahwa Bhinneka Tunggal Ika bagi bangsa Indonesia bersifat inklusif serta egalitarian dalam bidang politik, budaya dan ekonomi akan diwujudkan dan dipelihara secara dinamis apabila terdapat distribusi kekuasaan yang relatif seimbang di antara semua unsur bangsa (dalam Arwiyah, 2012). Upaya menciptakan persatuan dan kesatuan selalu terdapat tantangan dalam disintegrasi bangsa baik secara vertikal ataupun horisontal sehingga harus tertanam dari setiap bangsa Indonesia bahwa sesungguhnya setiap manusia itu satu dalam artian sama sebagai manusia ciptaan Tuhan Yang Maha Esa sehingga hal itu dapat digunakan sebagai faktor perekat integrasi dan ketahanan bangsa. Di tengah arus globalisasi pada masa reformasi saat ini yang harus dijadikan idiom basis strategi integrasi nasional adalah Bhinneka tunggal Ika. Bahwasanya, sekalipun satu kita tidak boleh melupakan bahwa sesungguhnya bangsa Indonesia itu berbeda-beda dalam kemajemukan. Bangsa Indonesia merdeka karena ada persatuan dan kesatuan bukan semangat kemanunggalan (tunggal ika). Akan tetapi, semangat persatuan dan kesatuan ini muncul karena adanya sikap saling menghormati dari kemajemukan tersebut. Kemajemukan dan keanekaragaman bangsa Indonesia sebagai kekuatan. Apabila mengkaji kebinnekaan sebagai perekat integrasi bangsa Indonesia tidak dapat melupakan Pancasila sebagai *fundamental norm*.

Negara Indonesia sebagai negara majemuk diperlukan unsur perekat yang universal, adapun unsur perekatnya adalah kepercayaan akan adanya Tuhan karena unsur ini sebagai dasar utama pada sila pertama. Apabila bangsa kita

sepakat dan meyakini akan adanya Tuhan, maka kita akan menghormati keanekaragaman, karena keberagaman terjadi atas keinginan Tuhan. Tuhan menciptakan manusia beragam sehingga kewajiban sebagai makhluk-Nya adalah saling menghormati. Artinya meskipun beragam kita adalah sama yaitu manusia ciptaan Tuhan. Tahapan berikutnya ketika kita sudah mampu menghormati sesama manusia, maka kita menjadi manusia yang beradab (sila kedua) yaitu ketika sudah tidak membeda-bedakan lagi antar sesama manusia. Selanjutnya setelah kita menjadi manusia beradab, maka tercipta persatuan (sila ketiga). Tahapan berikutnya setelah tercipta persatuan, maka akan lahir manusia yang bijak (sila keempat), dimana orang dapat dikatakan manusia yang bijak, maka akan berlaku adil dan makmur (sila kelima).

Rangkaian emperikal tersebut di atas, fondasi yang hakiki dari integrasi bangsa adalah sikap menghormati terhadap kebhinnekaan sebagaimana dikemukakan Liddle bahwa integrasi nasioanal yang tangguh akan berkembang apabila: (1) Sebagian besar anggota suatu masyarakat bangsa sepakat tentang batas-batas teritorial sebagai suatu kehidupan politik dalam mana mereka menjadi warganya; (2). Apabila sebagian besar masyarakat sepakat mengenai struktur masyarakat dan peraturan hidup yang berlaku bagi seluruh masyarakat (dalam Nasikun, 2003; Arwiyah, 2012). Namun demikian menurut Nasikun (1996, h. 8-9) integrasi nasional dari segi horizontal ditentukan oleh dua hal yaitu: (1). Konfigurasi dasar struktur masyarakat yang bersangkutan berdasarkan sejumlah parameter nominal; (2). Karakter hubungan antara berbagai parameter sosial itu. Dalam hubungan dengan hal yang pertama, suatu masyarakat majemuk dengan kompetisi seimbang dan masyarakat majemuk dengan mayoritas dominan

memiliki kemampuan untuk mengembangkan dinamika integrasi nasional dari pada suatu masyarakat dengan minoritas dominan atau masyarakat majemuk dengan segmentasi. Di dalam hubungan dengan faktor kedua, masyarakat majemuk dengan interaksi berbagai parameter struktur sosial memiliki dinamika integrasi nasional yang lebih tinggi daripada suatu masyarakat majemuk dengan struktur sosial yang terkonsolidasi. Logika yang mendasarinya adalah diferensiasi senantiasa menciptakan sekat-sekat yang membuat hubungan-hubungan sosial antara warganya tidak mudah berkembang.

Berangkat dari sumber emperikal dan teoritikal tersebut bangsa kita mengakui bahwa lima dasar yang terkandung dalam Pancasila secara sendiri-sendiri mungkin saja bersifat universal, karena masyarakat dan bangsa lain mungkin pula memilikinya. Akan tetapi persepsi bangsa kita yang melihat dan memahami dan menghayati kelima nilai dasar dalam satu rangkaian yang utuh, satu sistem nilai dasar yang saling berkaitan, saling menjiwai, saling mengisi dan saling memperkuat telah menjadikannya sebagai ideologi hasil ciptaan bangsa kita sendiri (Oesman dan Alfian, 1991, h.7).

Karenanya menurut Alfian (1991) kondisi yang demikian bisa tercipta bila terdapat suatu kekuatan ideologi yang sangat tergantung pada kualitas dimensi yang terkandung dalam dirinya yaitu: Pertama dimensi realita, dimana nilai-nilai dasar yang terkandung dalam ideologi itu secara riil berakar dan hidup dalam masyarakat atau bangsanya, terutam nilai-nilai dasar itu bersumber dari budaya dan pengalam sejarahnya. Sebagaiman diketahui Pancasila memenuhi dimensi ini dengan baik sekali. Kedua dimensi idealisme bukan sebuah angan-angan yang member harapan tentang masa depan yang lebih baik melalui perwujudan atau

pengalamannya dalam praktek kehidupan bersama mereka sehari-hari dengan berbagai dimensinya. Dalam dimensi kedua ini Pancasila memenuhi syarat yang sangat baik untuk dimensi ini. Ketiga dimensi fleksibilitas atau dimensi pengembangan dimana ideologi tersebut memiliki keluawesan yang memungkinkan dan bahkan merangsang pengembangan pemikiran-pemikiran baru yang relevan tentang dirinya, tanpa menghilangkan atau mengingkari hakekat atau jati diri yang terkandung dalam nilai-nilai dasarnya.

Jati diri bangsa Indonesia itu sendiri menurut Kemko Kesra merupakan fitrah manusia fitrah manusia yang merupakan potensi dan bertumbuh berkembang selama mata hati manusia bersih, sehat dan tidak tertutup. Jati diri yang dipengaruhi lingkungan akan tumbuh menjadi karakter dan selanjutnya karakter akan melandasi pemikiran, sikap dan perilaku manusia. Oleh karena itu tugas bangsa kita termasuk tugas kita adalah menyiapkan lingkungan yang mempengaruhi jati diri menjadi karakter yang baik. Oleh karena itu bila dicermati secara seksama, maka ada tiga gagasan kunci yakni: (1). Hakekat jati diri bangsa sebagai fitrah manusia; (2). Konteks lingkungan yang diperlukan untuk menumbuhkembangkan jati diri bangsa; (3). Dasar dan rujukan filosofi ideologis Pancasila (Winataputra, 2012). Dalam ketiga gagasan itu sesungguhnya merupakan salah satu katalisator yang memungkinkan terjadinya proses penumbuhkembangkan jati diri bangsa melalui proses komunikasi dan interaksi sosial-kultural antar etnis, kelompok atau komunitas secara nasional.

Diiilhami oleh pemikiran dari Alfian, Siswomihardjo (dalam Halking, 2012) mengurai ketiga dimensi tersebut sebagai berikut: pertama, dimensi realitas diartikan sebagai nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dikonskretisasikan

sebagai cerminan kondisi objektif yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, suatu rangkaian nilai-nilai yang bersifat *sein im sollen* dan *sollen im sein* yang secara imperative merupakan tugas dan tanggungjawab kita semua dan peran para penyelenggara negara utamanya. Untuk menerapkan ke dalam sikap pandang, pendapat dan perbuatan. Kedua, dimensi idealitas dalam arti bahwa idealisme yang terkandung di dalamnya bukanlah sekedar utopi tanpa makna, melainkan diobjektivasikan sebagai kata kerja melalui suatu gerakan yang diprogramkan oleh pemerintah untuk membangkitkan gairah dan optimism para warga masyarakat guna melihat masa depan secara prospektif. Para *founding father* bangsa ini semenjak tahun 1908 merintis jalan menuju kemerdekaan hingga tercapainya kemerdekaan melalui proklamasi 1945, mengajarkan bagaimana suatu ide dengan keuletan, keyakinan dan optimisme berhasil ditransformasikan menjadi suatu realita. Ketiga, dimensi fleksibilitasnya dalam arti bahwa Pancasila bukanlah barang jadi yang sudah selesai dan mandeg dalam kebakuan dogmatis dan normative, melainkan sebagai ideologi terbuka bagi tafsir-tafsir baru.

Dengan melalui pengembangan pemikiran-pemikiran baru ideologi tersebut akan dapat memelihara makna dan relevansinya tanpa kehilangan hakekatnya, sehingga demikian ideologi tersebut beserta nilai-nilai dasarnya tetap berbunyi dan komunikatif dengan masyarakatnya yang terus berkembang dan dinamika kemajuan zaman yang terus bergerak. Dengan demikian ideologi tersebut akan menzaman, tahan uji dan malahan semakin berkembang bersama-sama dengan realita-realita baru yang terus bermunculan. Melalui itu ia memelihara dan memperkuat relevansinya serta sekaligus merealisasikan dan mengembangkan jati dirinya sebagaimana dikemukakan di atas (Alfian, 1991).

Sebuah ideologi sesungguhnya merupakan pandangan hidup sebuah bangsa yang bisa menciptakan sistem kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pandangan hidup atau ideologi yang dapat mendorong lahir dan berkembang dan membudayanya nilai-nilai instrumental yang menggerakkan bangsanya menjadi masyarakat maju adalah sebuah ideologi yang memenuhi syarat sebagai berikut:

Pertama, ideologi tersebut secara sadar diakui kebenarannya oleh masyarakatnya, bukan sesuatu yang dipaksakan kepadanya. Ideologi semacam itu biasanya mengandung nilai-nilai dasar yang digali langsung dari kekayaan budaya, pengalaman sejarah dan intelektual bangsa tersebut dan tercipta melalui proses musyawarah-mufakat para pendiri. Nilai-nilai dasar itu bukan saja diakui kebenarannya, tetapi sekaligus diyakini sebagai miliknya yang paling hakiki sebagai pegangan, landasan dan tujuan kehidupan bersama mereka.

Kedua, ideologi tersebut membuka dirinya untuk dikembangkan secara terus menerus dari generasi ke generasi sehingga menjadikannya hidup dan dinamis, bukan sesuatu yang kaku dan beku. Oleh karena tiap generasi merasa berhak untuk mengembangkannya, tentu tanpa mengingkari jatidiri atau nilai-nilai dasarnya sesuai dengan tuntutan dinamika kehidupannya yang makin maju, maka ideologi bukan saja tidak akan kehilangan relevansinya, tetapi juga akan makin mapan dan makin diyakini kebenarannya. Sifat terbuka seperti itu hanya mungkin dimiliki oleh ideologi demokrasi. Sifat terbukanya itu sekaligus berfungsi sebagai dinamika internal yang menggerakkan masyarakatnya untuk mengembangkan ideologi demokrasi yang dimilikinya.

Ketiga, ideologi demokrasi tidak mungkin dapat memelihara sifat terbuka yang menjadi dinamika internalnya itu bilamana masyarakat, terutama mereka

yang memegang kekuasaan, tidak berhasil memiliki persepsi yang wajar dan sehat tentang itu. Sifat terbuka dari ideologi demokrasi mengandung makna bahwa tidak ada yang berhak memonopoli kebenaran tentang ideologi tu. Semua orang berhak mengembangkan pemikiran tentangnya, sejauh tidak main mutlak-mutlakan yang menganggap pemikirannya sajalah yang paling benar (Alfian, 1992, h. 21).

Berdasarkan ketiga paramater tersebut, maka dapat dikatakan bahwa Pancasila telah memenuhi persyaratan sebagai ideologi yang mampu merangsang lahir, berkembang dan menjiwai nilai-nilai instrumen yang diperlukan bangsa Indonesia untuk menjadi masyarakat modern, tidak lain tidak bukan karena ia adalah hasil galian bangsa Indonesia sendiri, melalui musyawarah-mufakat para pemimpin yang mewakili mereka. Pancasila bukan suatu ideologi yang paksakan apalagi diimpor dari luar. Nilai-nilai dasarnya bersumber dari budaya, pengalaman sejarah bangsa Indonesia sendiri. Selain itu ideologi Pancasila merupakan ideologi demokrasi yang terbuka, dimana sifat tersebut sudah dimiliki sejak kelahirannya yaitu melalui proses musyawarah yang hangat, tegang, kreatif dan produktif. Dengan demikian Pancasila adalah jiwa dari Undang-Undang Dasar 1945 karena nilai-nilai dasarnya yang lima itu adalah nilai-nilai fundamental ideologi nasional yang bersifat hakiki yang tidak mungkin berubah.

#### **4.3.2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Pada Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Integrasi Nasional Di Kota Gorontalo**

##### **4.3.2.1. Kondisi Sosial Budaya Dalam Masyarakat Terbuka**

Kondisi sosial masyarakat kota Gorontalo sangat sesuai dengan perubahan sosial budaya yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, artinya Pancasila sebagai ideologi dan dasar falsafah bangsa sangat diterima oleh masyarakat termasuk di



kota Gorontalo sebagai kekuatan sosial untuk melakukan sebuah perubahan, sehingga Pancasila dijadikan sebagai sumber podoman untuk menentukan nilai-nilai sosial budaya yang harus diterima. Salah satu modal sosial budaya yang masih tumbuh dalam masyarakat Gorontalo adalah saling kerjasama, gotong royong yang dilakukan dengan semangat kekeluargaan.

Prinsip masyarakat Gorontalo yang masih mempertahankan kebiasaan gotong royong tersebut menurut pandangan Soemardjan (1991, h.184-187) bahwa gotong royong adalah sebuah perubahan sosial yang terjadi tanpa disengaja atau direncanakan dan tidak dapat dicegah karena masih dianggap sebagai salah satu sendi utama dari kebudayaan nasional. Hal demikian disebabkan pola kehidupan masyarakat di pedesaan menurut adat pada umumnya bersifat komunalistik dalam arti bahwa setiap perilaku warga masyarakat desa pertama-tama dinilai atas dasar kepentingan masyarakat seluruhnya, baru tahap kedua dinilai menurut kepentingan pribadi dari orang yang berperilaku itu. Dengan demikian kepentingan umum menurut adat di desa kepentingan umum dinomor satukan dan kepentingan pribadi dinomor duakan.

Sementara itu masyarakat kota Gorontalo masih memelihara sistem hubungan kekeluargaan yang tinggi, misalnya kewajiban menghormati orang tua, para ulama, tokoh adat dan para pemimpin formal maupun informal dalam masyarakat. Meskipun dewasa ini akibat globalisasi yang menganut keluarga modern sistem kekeluargaan dalam hal penghormatan terhadap seseorang sangat tergantung pada pendidikan, pangkat tinggi dalam pemerintahan atau keberhasilan ekonomi sebagai orang kaya. Sehingga sistem penghormatan dalam kekeluargaan

pada prestasi seseorang menurut ukuran modernisasi baik didasarkan pada tingkat pendidikan, jabatan maupun kekayaan.

Selain budaya gotong royong dan sistem kekeluargaan masih terlihat dalam masyarakat perkotaan Gorontalo, juga hal yang paling penting dalam implementasi nilai-nilai Pancasila adalah bagaimana membangun intergrasi dalam masyarakat di daerah ini yang kelihatannya begitu toleran dalam keberagaman sosial, meskipun tingkat pluralisme masyarakat dalam kota Gorontalo tidak cukup tinggi bila dibandingkan dengan kota-kota besar lainnya di Indonesia. Namun masyarakat Gorontalo sangat terbuka dengan kelompok-kelompok sosial lainnya yang sangat jarang ditemukan pada masyarakat daerah yang memiliki sikap politik etnis yang tinggi dan etnosentrisme.

Untuk mengikhtisari pandangan di atas yang dikaitkan dengan argumentasi pada sub bab sebelumnya yang berkaitan dengan persyaratan sebuah ideologi yaitu ideologi diakui kebenarannya, membuka dirinya dan terbuka sesungguhnya terdapat makna nilai-nilai Pancasila yang diimplemtasikan dalam kehidupan sehari-hari termasuk di masyarakat kota Gorontalo, tentu tidak terlepas dari pengamatan mantan menteri Sekretaris Negara Moerdiono (1992, h.379) yang memberi pandangan bahwa dalam kehidupan kenegaraan perlu memperhatikan nilai kultural kekeluargaan yang sudah lama tertanam dalam kehidupan rakyat Indonesia di daerah-daerah yaitu: (1). Nilai dasar yaitu asas-asas yang kita terima sebagai dalil yang mutlak, yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Karena itu semangat kekeluargaan bisa kita sebut sebagai nilai dasar; (2). Nilai instrumen adalah pelaksanaan umum dari nilai dasar biasanya dalam wujud norma sosial atau norma hukum; (3). Nilai praktis adalah nilai yang sesungguhnya kita

laksanakan dalam kenyataan yaitu bagaimana mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kemasyarakatan.

Berdasarkan ketiga dimensi nilai yang dikemukakan di atas ternyata nilai dasar dan nilai instrumental sangat terlihat dalam masyarakat kota Gorontalo, dimana mereka sangat mengaktualisasikan nilai-nilai dasar yaitu dalam bentuk kekeluargaan yang sangat tinggi yang mencerminkan nilai kultural masyarakat Gorontalo pada umumnya dan masyarakat kota pada khususnya yang sangat terikat dengan budaya Gorontalo yang bernuansa religius dengan semboyan adat bertumpu pada syara, syara bertumpu pada Al-Quran (adat hulo-huloa to saraa, saraa hulo-huloa to Qurani). Sementara itu nilai instrumen terlihat dalam kehidupan masyarakatnya terutama yang berkaitan dengan interaksi masyarakat masih bersifat kekeluargaan dan masih menunjukkan sifat kerjasama dalam hal bergotong royong dan saling menolong yang dikenal dengan istilah Huyula serta mengedepankan musyawarah. Semuanya membentuk relasi sosial antara warga semisal tradisi gotong royong membangun rumah, tempat ibadah dan jalan. Sedangkan aspek musyawarah (*dulohupa*) terlihat pada hal-hal yang menyangkut aspek kehidupan formal maupun informal. Pada tataran formal seperti pengambilan keputusan dalam kehidupan pemerintah di daerah yang selalu didahului oleh musyawarah, dan yang informal terbentuk pada musyawarah di desa seperti dalam bentuk rapat musyawarah untuk memutuskan tujuan bersama (*modulohupa*). Tetapi kondisi keduanya sudah mulai mengalami erosi sebagaimana dijelaskan di atas, yang sebenarnya diakibatkan oleh proses globalisasi dan perkembangan perubahan sosial masyarakat perkotaan yang begitu cepat.

Selanjutnya berkaitan dengan kondisi sosial budaya yang terbuka pada masyarakat Gorontalo termasuk masyarakat di kota Gorontalo terhadap pluralisme yang sudah ada semenjak perjuangan kemerdekaan, permesta, hingga menjadi sebuah kota yang sekaligus sebagai ibu kota provinsi Gorontalo yang sebelumnya ketika masih menjadi bagian dari propinsi Sulawesi Utara bersama-sama dengan kabupaten Gorontalo merupakan modal yang sangat berharga dan tak ternilai dalam membangun integritas nasional. Fenomena di daerah ini sebagai kota Gorontalo sangat bertentangan dengan kondisi daerah lain yang masyarakatnya heterogenitas yang memiliki karakter etnosentrisme dan politik etnis yang begitu kuat dalam masyarakat di daerah sebagaimana terjadi seperti di Papua, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara dan daerah lainnya. Fenomena yang demikian yang terjadi diberbagai daerah diidentifikasi karena pengaruh sikap lokalitas yang berlebih-lebihan melampaui ikatan *nation building* yang telah dibangun oleh para pendiri bangsa yang sangat mengkhawatirkan dewasa ini. Sehingga dalam aspek rekrutmen di daerahpun kecenderungan makin terbawa dengan mulai menguatnya lokalisme yang dibarengi oleh etnosentrisme dan politik etnis yang berlebih-lebihan (Wantu, 2011).

Pada hal *nation building* (integrasi nasional) adalah formulasi dalam menghadapi ketegangan sosial sebagaimana mengutip pandangan dari Renan adalah sebagai suatu upaya terencana dan berkelanjutan untuk menanamkan kesadaran pada kalangan yang luas dalam masyarakat, bahwa walaupun beraneka ragam latarbelakang etnis, agama dan budaya mereka tetap adalah suatu bangsa (Bahar, 1998, h. 161). Sedangkan suatu *nation* yang secara bersama-sama dapat membangun masa depan yang lebih baik di dalam suatu *nation-state* yang sama-

sama (Bendix, 1969). Akan tetapi seringkali nation building di era sekarang bisa dikalahkan oleh kepentingan lokalis yang sempit. kecenderungan seperti itu pernah diteliti oleh Johermansyah (2005, h.216) tentang fenomena etnosentrisme dalam otonomi daerah yang menemukan bahwa salah satu masalah pemerintahan lokal adalah rekrutmen birokrasi di tingkat daerah. Fenomena dalam proses rekrutmen tersebut mengentalnya etnosentrisme dengan nuansa etnis merebak di banyak daerah baik di propinsi maupun kabupaten/kota.

Meskipun di kota Gorontalo pernah terjadi konflik yang berskala kecil pada tahun 80-an yang dipicu oleh konflik kesalahpahaman antara seorang warga keturunan dengan masyarakat kota Gorontalo menyangkut masalah agama masih diredam oleh pemerintah daerah sebagaimana diuraikan sebelumnya, namun sikap etnosentrisme dan politik etnis sering kali muncul dalam masyarakat kota Gorontalo. Walaupun dalam ukuran eskalasinya dalam jumlah sangat kecil dibanding daerah lain yang telah disebutkan itu yaitu pada saat atau momentum tertentu dan ini terbukti dengan gambaran masyarakat kota Gorontalo yang sedikit mewarnai kemajemukan., bahkan dalam birokrasinya maupun kepemimpinan daerahnya pernah beberapa kali dipimpin oleh etnis di luar Gorontalo sebagaimana diguraikan dalam temuan penelitian. Keterbukaan terhadap penerimaan dari etnis luar banyak mewarnai masyarakat kota yang dinilai masyarakatnya memiliki konstelasi kemajemukan sosial, walaupun masyarakat etnis asli Gorontalo masih menjadi kelompok etnis yang dominan. Kebijakan-kebijakan para pemimpin daerah tidak pernah diskriminasi karena semua kelompok etnis dalam masyarakat baik keturunan Arab, Cina dan sebagainya diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk beraktivitas baik disektor ekonomi,

maupun disektor lainnya. Kebijakan itu dinilai memiliki hakekat adanya kepedulian *social equity* dalam membangun sebuah masyarakat daerah dengan memperhatikan kondisi masyarakat Indonesia yang terkenal majemuk.

Kondisi masyarakat kota Gorontalo yang memiliki sifat menerima keberagaman sosial tersebut adalah salah satu ciri karakteristik multikultural (Cogan,1998). Dengan meminjam pemikiran dari Taylor (1994) bahwa ide multikulturalisme adalah gagasan mengatur keberagaman dengan prinsip dasar pengakuan akan keberagaman itu sendiri. Dalam teorisasi demokrasi sebagaimana pendapat Kymlica dalam Savirani, 2003) bagaimana sebuah negara demokratis mengelola isu keberagaman kelompok etnis kultural. Teorisasi ini menawarkan eksistensi etnis-kultural adalah melalui integrasi atau asimilasi ke dalam kelompok mayoritas dan dimana pandangan sesungguhnya mirip dengan pemikiran Myron sebagaimana diurai di atas.

Dengan demikian multikulturalisme memberikan kontribusi nyata terhadap agenda demoratisasi dan nondiskriminasi yang mana perhatian besar terdapat equalitas dan nondiskriminasi kaum minoritas telah menghubungkan multikulturalisme dengan demokrasi. Sebagai alternatif atas penolakan terhadap diskriminasi, multikulturalisme memberikan nilai positif terhadap keberagaman kultural. Konsekwensi lebih lanjut adalah kesiapan untuk memberikan apresiasi konstruktif terhadap segala bentuk tradisi budaya dan juga termasuk di dalamnya agama. Untuk itu dalam membangun tatanan masyarakat dan tatanan sosial di bawah payung kebhinekaan dibutuhkan keariban budaya dan sosial, sehingga dalam masyarakat yang multikultural akan terwujud sebuah masyarakat yang saling

menghormati, menghargai perbedaan keanekaragaman sosial (Chandara dan Yuliadhani, 2012).

#### **4.3.2.2. Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Membangun Integrasi Bangsa Melalui Keterwakilan Etnis Dipemerintahan Kota Gorontalo.**

Dengan melihat secara diakronis kondisi emperikal masyarakatnya yang terbuka sebagaimana dijelaskan di atas, kondisi kehidupan sosial masyarakat di kota Gorontalo sejak Orde Lama hingga Orde Baru pemimpin daerah ini pernah dipegang oleh etnis luar baik itu yang berasal dari Jawa, Jawa Tondano maupun lainnya, demikian juga para pegawainya banyak yang berasal dari etnis bukan Gorontalo. Tingkat penerimaan keberagaman sosial dalam masyarakat merupakan penjelmaan dari nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi yang mampu menyatukan keberagaman baik multi etnis, multi agama dan sebagainya. Aktualisasi dari berbagai unsur perbedaan yang bisa disatukan yang merupaka capital yang bisa memperkaya mosaik untuk membangun integrasi nasional yang kuat.

Berdasarkan persandingan teori di atas implikasi atau aktualisasi tersebut bisa dilihat dari tingkat penerimaan maupun kebijakan keterwakilan etnis dalam birokrasi pemerintah daerah di Kota Gorontalo sesungguhnya sudah dipraktekkan jauh sebelum propinsi Gorontalo terbentuk sebagai propinsi baru setelah memekarkan dirinya dari Sulawesi Utara. Pada saat sebelum menjadi propinsi wilayahnya terbagi dua daerah yaitu kabupaten Gorontalo dan kota Gorontalo dan bergabung dalam wilayah Sulawesi Utara. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa disamping masyarakatnya terdiri dari berbagai etnis juga kepeminan pemerintahan daerahnya beberapa kali diwarnai oleh keterwakilan etnis karena kecenderungan ini ditentukan oleh beberapa faktor antara lain:

Pertama, Masyarakat kota Gorontalo menjunjung tinggi nilai keadilan sosial yang diwujudkan dengan adanya perwakilan proporsional dalam masyarakat yang dikenal dengan *representative bureaucracy* (perwakilan birokrasi). Perwakilan etnis dalam birokrasi publik sejak daerah ini terbentuk baik sebagai kota Gorontalo para pemimpin daerahnya selalu bergantian dari etnis-etnis lain. Kepala daerah di kota Gorontalo yang mewarnai keterwakilan etnis terdiri atas: Atje Slamet (Jawa), Abas Nusi (dianggap masih berdarah keturunan keturunan Cina), Ahmad Arbi (Jaton-Jawa Minahasa).

Kedua, konstelasi politik dan pemerintahan daerah di Sulawesi Utara sangat didominasi oleh etnis Minahasa, sehingga dengan penguasaan etnis tersebut menyebabkan distribusi jabatan atau kekuasaan sangat ditentukan dan dikendalikan oleh mereka. Dominasi kelompok etnis ini terjadi dalam berbagai kasus seperti memperlihatkan suksesnya elit Minahasa dapat menguasai para elit lainnya dengan adanya penguasaan seluruh sumber daya berupa kekuasaan maupun jabatan, bahkan mereka tidak memberi kesempatan kepada etnis minoritas baik kepada Sangir Thalaud dan Bolaang Mongondow termasuk (kota/kabupaten) Gorontalo. Penguasaan etnis Minahasa kepada Gorontalo dapat dilihat dari intervensi pemilihan walikota Gorontalo yang harus mendapat restu dari mereka bahkan melakukan *droping* untuk pejabat bupati seperti di kota Gorontalo Slamet, Ahmad Arbi. Begitu juga siapa yang menjadi sekretaris daerah seperti di kota Gorontalo beberapa kali di *droping* dari luar Gorontalo yaitu Mokoginta, Patra Babo (Bolaang Mongondow (Wantu, 2011).

Kebijakan birokrasi pemerintahan dari seperti ini sejalan dengan Ripper (1955) yang menjelaskan bahwa sebuah birokrasi perlu mencerminkan sebuah



komposisi keterwakilan yang layak dalam lembaga politik dan dimana sikap dan segala bentuk tantangan yang menyangkut kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan publik tersebut dapat dihilangkan atau diperkecil dengan mengedepankan prinsip dasar keterwakilan, yang pada hakekatnya dikedepankan oleh pemerintah. Dasar pertimbangan para elit dan masyarakat kota Gorontalo yang mengikuti model *representative bureaucracy* menunjukkan adanya wujud pemerintahan daerah kota Gorontalo yang mewarnai pluralitas. Masyarakat Kota Gorontalo maupun birokrasi pemerintahan daerah kelihatan sedikit mozaik antara masyarakat asli Gorontalo yang dominan dan masyarakat etnis pendatang merupakan cerminan diversivitas masyarakat yang heterogen yang di dalamnya kondisi masyarakatnya sedikit beragam etnis sebagai sebuah kebijakan politik multikulturalisme, yang mendapat dukungan dari masyarakat. Dengan meminjam pemikiran dari Taylor (1994) bahwa ide mutikulturalisme adalah gagasan mengatur keberagaman dengan prinsip dasar pengakuan akan keberagaman itu sendiri. Dalam teorisasi demokrasi sebagaimana pendapat Kymlica (dalam Savirani, 2003) bagaimana sebuah negara demokratis mengelola isu keberagaman kelompok etnis kultural. Teorisasi ini menawarkan eksistensi etnis-kultural adalah melalui integrasi atau asimilasi ke dalam kelompok mayoritas

Berangkat dari teorisasi tersebut keterbukaan tersebut menunjukkan keseimbangan dan semangat demokrasi yang mana kekuasaan dilaksanakan berdasarkan multikulturalisme dan kekuatan perwakilan proporsional etnis sebagai bentuk dari *representative bureaucracy* dengan mengadopsi tidak hanya etnis lokal tetapi juga para pendatang dari etnis luar dalam birokrasi pemerintah daerah yang dinilai sangat arif dan toleran. Kondisi kota Gorontalo sangat sejalan

dengan harapan terhadap otonomi daerah yang sangat berkaitan erat dengan terciptanya demokrasi di tingkat daerah. Sekaligus juga melahirkan suatu pemerintahan atau birokrasi daerah yang representatif dan bermakna dapat memupuk vitalitas demokrasi terutama ia memberikan bermacam-macam saluran akses tambahan pada kekuasaan bagi kelompok-kelompok yang terpinggirkan (etnis yang termarjinalkan dalam masyarakat plural), sehingga akan meningkatkan keterwakilan (representasi) dalam demokrasi. Harapan tersebut memungkinkan pemerintahan (birokrasi) lebih representatif, dalam arti merefleksikan keragaman populasi.

Kondisi masyarakat yang seperti ini dengan sendirinya membuka birokrasi publik yang menggambarkan keragaman etnis sesungguhnya sangat cocok dengan sikap masyarakat disamping keterbukaan sebagaimana dijelaskan di atas, juga ada budaya Gorontalo yang dikenal dengan "motombowata" yang mengakui ada asimilasi atau akulturasi dengan para pendatang (etnis lainnya) yang harmonis asalkan mereka mampu beradaptasi dengan masyarakat dan budaya atau adat Gorontalo. Oleh karena itu kebijakan pemerintah pusat dan provinsi Sulawesi Utara dalam rekrutmen pejabat daerah yang ditopang dengan prinsip motombowata sejalan dengan apa yang diterapkan dalam *representative bureaucracy* yang diargumentasikan oleh Warner (2001) berpendapat bahwa keterwakilan dalam birokrasi lebih mengembangkan keseimbangan dan semangat demokrasi dengan memberikan perwakilan masyarakat lokal dalam kekuasaan, dalam arti kekuasaan dilaksanakan berdasarkan kekuatan dari perwakilan daerah yang mengakomodasi kelompok-kelompok masyarakat dalam birokrasi pemerintahan. Pengakomodasian tersebut diharapkan supaya proses demokrasi

dalam negara yang pluralis atau multi etnis dapat dikelola dengan menggunakan perspektif keterwakilan (dalam Yakob, 2007)

Keterbukaan masyarakat kota Gorontalo yang begitu toleran dan mengedepankan integrasi, sedikit kotra produktif dengan kondisi di daerah lain yang sangat peka dengan kemajemukan sosial sebagaimana diargumentasikan di atas, mengingat banyak juga kritikan terhadap praktek desentralisasi atau otonomi daerah yang dilakukan secara serampangan dengan basis etnosentrisme dan politik etnis yang radikal. Hal ini tidak lain menurut Bahar (1995) menjelaskan bahwa sumber dari munculnya masalah hubungan etnis dalam proses rekrutmen pejabat di birokrasi pemerintahan dipicu oleh adanya kekecewaan etnisitas dalam suatu negara.

Dengan kata lain isu yang paling rawan dalam kebijakan rekrutmen untuk Indonesia sebagai bangsa yang pluralis adalah pengangkatan maupun penempatan pegawai dan pejabat pemerintah termasuk di tingkat daerah. Yang mana harus diperhatikan adalah sejauh mana kelompok-kelompok etnis minoritas maupun yang mayoritas terwakili dalam struktur birokrasi pemerintahan baik di pusat maupun daerah (Rasyid, 1998). Sehingga menimbulkan gerakan-gerakan yang didasarkan oleh kesadaran etnis yang mengajukan berbagai ragam tuntutan politik untuk mendirikan daerah otonom. Pada hal menurut Smith (1985) banyak negara-negara di dunia dewasa ini yang masyarakatnya pluralis baik dari segi etnis, sosial dan budaya telah membentuk suatu identitas tersendiri, yang pada akhirnya memunculkan keragaman dalam birokrasi pemerintahan (termasuk di tingkat daerah).

Untuk menghindari potensi konflik etnis, baik laten (*latent*) maupun nyata (*manifest*) dalam rekrutmen pejabat pemerintah daerah yang akan berakibat pada perpecahan bangsa, seyogyanya pemerintahan daerah harus memperhatikan kondisi kemajemukan etnis dengan cara melakukan representasi yang proporsional terhadap etnis-etnis yang ada dalam rekrutmen pegawai maupun pejabat yang ada dilingkungan pemerintahan daerah. Pandangan tersebut didasarkan pada argumentasi Peters (1978) yang menyatakan bahwa birokrasi pemerintahan di dunia modern selalu mencerminkan adanya representasi atau perwakilan dari setiap kelompok-kelompok etnis. Sehingga representasi sejumlah etnis baik etnis mayoritas maupun minoritas di antara personil organisasi akan menghasikan kompetisi dalam upaya menciptakan efektifitas dalam pemerintah.

Fenomena hubungan antara rekrutmen dan representasi etnis yang cenderung memunculkan gejala etnosentrisme dan berakhir dengan ketidakpuasan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terutama menyangkut kebijakan rekrutmen birokrasi pemerintahan daerah hingga kini tetap menjadi persoalan besar bangsa Indonesia dan memberi implikasi pada integrasi nasional. Padahal kebijakan melalui desentralisasi atau otonomi daerah, prinsip-prinsip pluralisme atau kemajemukan dalam representasi birokrasi merupakan sarana yang sangat penting untuk meningkatkan legitimasi pemerintah baik pusat maupun daerah atau kekuasaan politik birokrasi dalam konteks demokrasi. Prinsip utamanya bahwa birokrasi merepresentasikan perbedaan ragam dalam masyarakat terutama menyangkut pelayanan dan merespon kepentingan dari semua golongan dalam pembuatan kebijakan dan keputusan. Dari sudut pandang ini, di tingkat daerah nilai demokrasi lebih dapat dijamin, efektivitas dalam penyelenggaraan

pemerintahan daerah dapat diwujudkan. Bila dikaitkan dengan integrasi nasional atau dalam konsep ilmuwan Barat dibaca sebagai *Nation Building* ketika melihat lokus kota Gorontalo sebagai bagian wilayah Indonesia yang terintegrasi dengan berbagai dimensi sosial yang berbasis pada agama, etnis, bahasa daerah asal dan sebagainya (Wantu, 2011).

Model yang dipraktekkan masyarakat kota Gorontalo dalam birokrasi daerah yang sangat memperhatikan heterogenitas etnis yang direkrut baik menjadi pejabat, pegawai mewarnai birokrasi pemerintahan kota Gorontalo sebagaimana model *representative bureaucracy* yang tentunya situasi tersebut paralel dengan hasil-hasil penelitian Guy Peters (1978) dalam kajiannya menyangkut analisa *the politics of bureaucracy* yang membahas beberapa gejala umum dari birokrasi dunia modern yang mencerminkan adanya keterwakilan dalam kelompok masyarakat. Peters mengamati beberapa negara yang sangat memperhatikan perimbangan dan keterwakilan etnis seperti di Kanada, Amerika Serikat, Malaysia, India dan Israil. Sesungguhnya kelompok etnis dominan menguasai sekitar 67%-87% posisi kunci pada birokrasi pemerintahan di tingkat nasional seperti Amerika Serikat, Kanada dan India, tetapi mereka sangat baik penempatan etnis dominan dan minoritas. Malaysia yang hanya 33% kelompok etnis minoritas relatif terakomodasi lebih baik dibandingkan dengan Israil yang hanya 6,6% dan tergolong sebagai negara yang paling buruk kemampuan akomodasinya terhadap etnis minoritas (dalam Wantu, 2011).

#### **4.3.3. Model Rekomendasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Pada Masyarakat Lokal Yang Sesuai Dengan Dimensi Integrasi Nasional.**

Rekonstruksi model rekomendasi implementasi nilai-nilai Pancasila adalah upaya untuk menata kembali pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai kebangsaan yang bersumber pada pilar kebangsaan antara lain Pancasila. Rekonstruksi model rekomendasi yang akan dirumuskan sedapat mungkin menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan seluruh komponen baik komponen bangsa, wilayah dan pemerintahan negara Indonesia termasuk di tingkat lokal yakni pemerintahan kota Gorontalo.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dielaborasi secara empirikal di kota Gorontalo menyangkut implementasi nilai Pancasila pada masyarakat lokal selalu mengacu pada pemahaman Pancasila sebagai konsensus nasional yang selalu dibuat menjadi podium dalam interaksi kehidupan masyarakat terutama sebagai pemandu menuju hari esok yang lebih baik. Sehingga Pancasila sebagai dasar negara yang digali dari kristalisasi nilai-nilai dari sosio kultural bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai pandangan hidup, ideologi, perjanjian luhur bangsa, jiwa kepribadian masyarakat Indonesia yang sangat santun, sebagai sumber hukum, filosofi bangsa, arah dan tujuan nasional dan sekaligus sebagai bingkai yang menjadi podium pembangunan politik bangsa termasuk di dalamnya dalam rangka menjaga persatuan bangsa.

Karena salah satu peranan Pancasila yang menonjol sejak permulaan penyelenggaraan negara Republik Indonesia adalah fungsinya dalam mempersatukan seluruh rakyat Indonesia menjadi bangsa yang berkepribadian dan percaya pada diri sendiri. Mendasari pada pandangan ini sebagaimana diketahui

bahwa kondisi masyarakat kota Gorontalo sejak dibentuk pada tahun 1960 adalah sedikit majemuk. Masyarakat kota Gorontalo dengan klasifikasi antara etnis dominan (etnis Gorontalo) dan etnis pendatang, tentu menunjukkan berbagai warna etnis di dalamnya yang juga disertai oleh multi agama. Gambaran kemajemukan ini memperlihatkan adanya berbagai komponen yang saling berinteraksi sebagai unsur mozaik kehidupan masyarakat yang dapat menjadi capital yang memperkaya heterogenitas masyarakat dari kultural untuk membangun integrasi nasional yang kuat di tengah-tengah globalisasi. Gambaran tersebut mirip dengan apa yang dikemukakan oleh Weiner (1988, h. 551) mengajukan strategi yang ditempuh oleh suatu negara yaitu asimilasi dan persatuan dalam keanekaragaman (bagi Indonesia identik dengan Bhinneka Tunggal Ika. Menurut Weiner asimilasi adalah pencapaian integrasi dengan menjadikan kebudayaan suku yang dominan dalam suatu negara sebagai kebudayaan nasional. Hal ini dapat dicapai dengan jalan menundukkan identitas suku atau golongan minoritas kepada kebudayaan suku yang dominan. Sementara persatuan dalam keanekaragaman atau Bhinneka Tunggal Ika diartikan sebagai usaha untuk membentuk kesetiaan nasional yang dilakukan dengan tidak menghilangkan kebudayaan kelompok-kelompok minoritas.

Konsep Weiner mirip dengan karya Coleman dan Rosberg (dalam Sjamsuddin, 1997, h. 4) yang menyatakan bahwa integrasi nasional adalah proses pemersatuan bangsa disuatu negara yang terdiri atas dua dimensi yaitu integrasi vertikal dan horizontal. Integrasi vertikal mencakup masalah-masalah yang bertujuan menjembatani celah perbedaan yang mungkin ada antara kaum elit dan massa dalam rangka pengembangan proses politik terpadu dan masyarakat politik

yang berpartisipasi. Sedangkan integrasi horizontal bertujuan untuk mengurangi diskontinuitas dan ketegangan kultural kedaerahan dalam rangkas proses penciptaan suatu masyarakat politik yang homogen. Sementara Ake (1987, h. 13) menguraikan integrasi nasional dari sudut tautologis dimana istilah bangsa (*nation*) yang menjadi akar kata nasional itu secara normatif sudah mengandung makna kelompok manusia yang sangat terpadu. Dengan demikian istilah bangsa sudah dengan sendirinya merujuk pada integrasi karena komponen-komponenya memang sudah terintegrasi.

Faktor yang mempengaruhi implementasi Pancasila adalah kondisi masyarakat yang terbuka dapat dilihat dari masyarakat Gorontaslo khususnya di kota Gorontalo yang tidak mengutamakan individualisme yang merupakan landasan pemikiran masyarakat Barat. Paham keterbukaan sudah lama berkembang dalam masyarakat Gorontalo baik ditemukan di daera-daerah pedesaan di kabupaten Gorontalo maupun di daerah perkotaan sendiri yang sesungguhnya identik dengan globalisasi yang individualism. Sebagaimana diketahui paham keterbukaan tercermin dalam masyarakat berupa sifat gotong royong, rasa kekeluargaan dan kebersamaan. Sehingga tipe masyarakat kota Gorontalo yang memberikan suasana yang demikian kondusif ini sesungguhnya model ideal yang selalu mengangungkan kolektivitas dan demokratis.

Paham yang menjadi prinsip masyarakat di daerah ini sesungguhnya merupakan juga paham yang telah menjadi landasan integralistik yang dikemukakan oleh Supomo telah menjadi landasan ideologi konstitusi bersama. Paham integralistik sangat sejalan dengan sifat terbuka dan demokratis untuk menjaga praktek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan benegara. Akan tetapi



yang perlu dihindari adalah paham integralistik yang menjurus pada ekstrimitas yang tidak diinginkan. Berdasarkan paham integralistik bahwa dimensi hak-hak individu sebagai warga negara sebagaimana antara lain terpantul dalam proses kelahiran pasal 28 konstitusi, dimana dalam proses kelahirannya kehadiran dimensi tersebut dianggap perlu untuk menjaga agar negara kita jangan sampai menjadi negara kekuasaan yang otoriter, oleh karena itu tidak demokratis. Melalui dimensi ini sesungguhnya para perumus Pancasila dan UUD 1945 mempertegas sikap terbuka dan demokratis dari paham integralistik yang kita anut bersama, sifat terbuka dan demokratis dari rasa atau semangat kekeluargaan, gotong royong dan kebersamaan (Alfian, 1991).

Mendasari pada pemikiran tersebut terdapat nilai-nilai instrumental sebagai sebuah ideologi yang memenuhi syarat antara lain adalah ideologi demokrasi tidak mungkin dapat memelihara sifat terbuka yang menjadi dinamika internalnya itu bilamana masyarakat, terutama mereka yang memegang kekuasaan, tidak berhasil memiliki persepsi yang wajar dan sehat tentang itu. Sifat terbuka dari ideologi demokrasi mengandung makna bahwa tidak ada yang berhak memonopoli kebenaran tentang ideologi itu. Semua orang berhak mengembangkan pemikiran tentangnya, sejauh tidak main mutlak-mutlakan yang menganggap pemikirannya sajalah yang paling benar (Alfian, 1992, h. 21). Untuk mempertegas kembali argumentasi tersebut Alfian (1991, h. 218) menyatakan bahwa paham integralistik yang kita anut mengandung dimensi hak-hak dan kewajiban individu sebagai warganegara yang diatur oleh undang-undang (hukum) dan itu memperlihatkan sifat terbuka dan demokratis dari Pancasila dan UUD 1945 sebagai ideologi konstitusi kita. Makna dari sifat terbuka dan

demokratis jelas tidak sama dengan paham individualisme yang bertitik tolak pada kepentingan individu. Makana sifat terbuka dan demokratis dari paham atau aliran pemikiran integralistik kita bertitik tolak pada kepentingan bersama, tetapi kepentingan bersama yang tidak mematikan atau melumpuhkan hak-hak dan kemerdekaan individu dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Idealnya melalui paham integralistik yang kita anut semangat kekeluargaan, gotong royong dan rasa kebersamaan yang kita kembangkan justru diharapkan untuk sekaligus merangsang para anggota masyarakat membangun dirinya secara dinamis dan kreatif.

Dengan melihat argumentasi yang telah disampaikan, maka model teoritik yang akan digunakan dalam penelitian adalah sebagai hasil konstruksi jalan berpikir integrasi nasional dari karya Weiner (1982, h.1988), Coleman dan Rosberg. Keduanya memberikan pemikiran yang dianggap cukup meyakinkan untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Dimensi utama dalam masyarakat yang bersifat heterogen strategi yang paling tepat dilakukan oleh suatu negara termasuk di tingkat lokal adalah konsep asimilasi dan persatuan dalam keanekaragaman atau dikenal dengan dengan Bhinneka Tunggal Ika.
2. Kebijakan inntegrasi nasional ditujukan untuk menjembatani adanya persatuan perbedaan baik bersifat vertikal maupun horisantal yang ada dalam satu masyarakat.
4. Model integrasi nasional dari Weiner, Coleman dan Rosberg sangat tepat untuk dijadikan fondasi yang kuat untuk menyatukan masyarakat yang mencerminkan pluralisme yang memiliki kepentingan yang berbeda.

5. Model integrasi nasional pada lokus kota Gorontalo melalui implementasi nilai-nilai yang masyarakatnya mencerminkan sedikit kemajemukan sesungguhnya merupakan ciri dari karakteristik pendekatan multikulturalisme yang menata suatu keberagaman dengan prinsip dasar pengakuan akan keberagaman itu sendiri.

Berdasarkan pada pembahasan tentang model rekomendasi tentang implementasi nilai-nilai Pancasila pada masyarakat lokal yang sesuai dengan dimensi integrasi nasional, maka penulis merekomendasikan bahwa perlu melakukan peningkatan terhadap pemahaman dan implementasi terhadap nilai-nilai kebangsaan yang bersumber pada pilar kebangsaan sebagai berikut:

1. Menanamkan nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari empat pilar kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam menghadapi persoalan nasional yang mengandung ancaman potensial maupun manifest terhadap kelangsungan kehidupan bangsa Indonesia.
2. Dibutuhkan adanya konsistensi dalam hal meningkatkan pemahaman dan implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai konsensus nasional untuk menjadikannya sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Sehingga konsensus yang tinggi tersebut menciptakan nilai-nilai sosial bersama yang ditunjukkan dengan tidak adanya perpecahan dan kesenjangan di antara golongan yang ada dalam masyarakat.
3. Dibutuhkan adanya konsep memasyarakatkan Pancasila bukanlah hanya sekedar Pancasila diketahui atau dihapalkan, namun Pancasila harus

ditanamkan dalam bathin dan dijadikan sebagai podoman dalam sikap, perilaku dan pembuatan dalam hidup bermasyarakat, bernegara dan berbangsa.

4. Dalam menghindari persoalan disintegrasi nasional di tingkat daerah perlu mempersatukan seluruh elemen masyarakat dengan menanamkan kesadaran pada kalangan yang luas bahwa meskipun beraneka ragam latarbelakang etnis, agama dan budaya mereka tetap adalah suatu bangsa yang secara bersama-sama dapat membangun masa depan yang lebih baik. Selain itu dibutuhkan pola pemikiran yang terintegrasi yang sesuai dengan kondisi masyarakat daerah/lokal untuk menghindari ketidakharmonisan tersebut dalam bentuk akomodasi dalam kehidupan sosial dan politik, mengingat masyarakat Indonesia begitu majemuk dan cenderung etnosentisme, primordial.
5. Untuk menumbuhkan keharmonisan masyarakat yang merupakan salah satu pilar terciptanya integrasi nasional, maka dibutuhkan satu pendekatan di tingkat lokal adanya ide multikulturalisme yang merupakan gagasan yang menata keberagaman dengan prinsip pengakuan terhadap berbagai perbedaan dalam masyarakat.
6. Untuk menghindari konflik sosial yang bisa menciptakan disintegrasi diperlukan suatu kebijakan pemerintah mulai dari tingkat pusat hingga di tingkat lokal adanya kebijakan dalam birokrasi pemerintah daerah untuk membuka birokrasi daerahnya berdasarkan pada komposisi struktur sosial masyarakat yang terkenal pluralis, sebagaimana dipraktekkan dalam birokrasi pemerintahan lokal di Gorontalo, termasuk di kota Gorontalo.

Kebijakan ini mirip dengan *representative bureaucracy* (perwakilan birokrasi) yakni birokrasi yang mencerminkan keadaan dan komposisi masyarakat baik dari segi geografis, agama dan etnis. Meskipun birokrasi pemerintahannya terbuka, tetapi pertimbangan didasarkan pada nilai-nilai rasional seperti profesionalitas, kualifikasi kompetensi, kapabilitas, sangat penting sehingga menghasilkan daya guna dan hasil guna.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

##### **5.1.1 Implementasi Nilai Pancasila Pada Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Integrasi nasional Di Kota Gorontalo**

Ideologi Pancasila sebagai sumber pilar kebangsaan menjadi konsensus nasional dalam berbagai dimensi untuk dalam rangka konsolidasi untuk menghadapi segala macam tantangan baik bersifat ekonomi, politik, sosial dan budaya. Konsolidasi sangat berakar dari nilai-nilai dasar yang terangkai dan menjadi satu dalam sebuah sistem. Dimana melahirkan nilai-nilai dasar yang berakar dan hidup dalam realita kehidupan masyarakat yang bersatu. Untuk itu Pancasila yang membentuk konsensus nasional sebagai dasar podoman dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

Konstruksi pembangunan politik dewasa ini dalam konsep kebangsaan Indonesia cukup memperhatikan secara serius sehingga perlu memperkuat pilar kebangsaan yaitu Bhinneka Tunggal Ika sebagai fondasi yang bisa menahan erosi bangsa yang cenderung mengancam integrasi bangsa. Karena itu masyarakat Indonesia yang tergolong heterogen seharusnya memiliki strategi yang ampuh dengan memperkuat persatuan dalam keanekaragaman atau Bhinneka Tunggal Ika diartikan sebagai usaha untuk membentuk kesetiaan nasional yang dilakukan dengan tidak menghilangkan kebudayaan kelompok-kelompok minoritas.

Pendekatan teoritikal yang menggambarkan Bhinneka Tunggal Ika secara emperikal mirip terlihat dalam masyarakat kota Goronttalo yang sedikit heterogen walaupun secara keseluruhan masyarakat etnis Gorontalo mendominasi atau

kelompok mayoritas terhadap etnis pendatang, mereka saling terintegrasi satu sama lain dalam kehidupan sosial.

### **5.1.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Pada Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Integrasi Nasional Di Kota Gorontalo**

#### **5.1.2.1. Kondisi Sosial Budaya Dalam Masyarakat Terbuka**

Nilai-nilai Pancasila yang diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat kota Gorontalo dapat dilihat pada nilai dasar yaitu dalam bentuk kekeluargaan yang sangat tinggi yang mencerminkan nilai kultural masyarakat Gorontalo yang memiliki budaya yang dilandasi oleh agama Islam yang dianut masyarakatnya. Sedangkan nilai instrumen sangat nyata pada masyarakat kota meskipun sudah mulai mengalami erosi yaitu berkaitan dengan gotong royong dan kekeluargaan.

Dilihat dari keterbukaan masyarakat kota Gorontalo yang sedikit majemuk sikap membangun integrasi nasional sangat kental diwujudkan dengan adanya penerimaan dan penghormatan terhadap berbagai etnis pendatang di daerah ini yang sangat kontra produktif dengan daerah lain di Indonesia yang masyarakatnya memiliki akar etnosentrisme yang kuat. Sehingga masyarakat kota Gorontalo mempraktekkan ide multikulturalisme dengan prinsip menerima dan mengakui keberagaman sosial.

#### **5.1.2.2 Sejarah Keterwakilan Etnis Pada Kepemimpinan Daerah Di Gorontalo Dan *Representative Bureaucracy* Dalam Rekrutmen Pejabat Di Propinsi**

Masyarakat kota Gorontalo yang sangat toleran dan terbuka dapat memungkinkan semua etnis memperoleh akses untuk masuk dalam birokrasi lokal

dan hal itu telah ditunjukkan oleh sejarah kepemimpinan di tingkat lokal sejak zaman dahulu sampai dengan sekarang.

Birokrasi Pemerintahan propinsi menjunjung tinggi nilai keadilan sosial yang diwujudkan dengan adanya perwakilan proporsional dalam masyarakat yang dikenal dengan *representative bureaucracy* (perwakilan birokrasi).

## **5.2. Saran**

Untuk mengimplementasi nilai-nilai Pancasila pada masyarakat lokal maka perlu pemerintah, dan berbagai elemen masyarakat melakukan beberapa hal untuk meningkatkan pemahaman dan aktualisasi nilai-nilai kebangsaan sebagai berikut: .

1. Untuk memahami nilai-nilai kebangsaan, maka perlu pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, sebagai mata pelajaran utama yang diajarkan disetiap sekolah mulai dari Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi.
2. P4 perlu digalakkan kembali dan juga diseminasi pendidikan maupun pengetahuan Pancasila harus menjadi kegiatan yang ada dimasyarakat maupun di lembaga-lembaga pemerintah termasuk sekolah dan perguruan tinggi.
3. Untuk membangun tatanan masyarakat yang kondusif yang didasarkan pada Bhinneka Tunggal Ika kebhinekaan diperlukan ide multikulturalisme yang saling menghormati, menghargai perbedaan dan sekaligus mengakui keanekaragaman sosial.
4. Pemerintah daerah sebaiknya membuka birokrasi daerahnya berdasarkan pada komposisi struktur sosial masyarakat yang terkenal pluralis. Dengan



diimbangi oleh nilai-nilai rasional seperti profesionalitas, kualifikasi kompetensi, kapabilitas, pendidikan, prestasi kerja.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, 1991, Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Kehidupan Politik, *Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa Dan Bernegara*, BP-7 Pusat
- ....., 1992, *Makna Pancasila Dalam Masyarakat Industri Modertn*, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia, Jakarta, Gramedia
- Ake, Claudio, 1987, *A Theory of Political Integration*, Illinois, The Dorsey Press
- Amal, Ichlasul, 2005, *Integrasi Nasional Dan Demokrasi*, Yogyakarta
- Arwiyah, M, Yahya, 2012, *Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Perikat Integrasi Dalam Mengatasi Fenomena Konflik Dan Kekerasan: Peran Pendidikan Kewarganegaraan*, Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia
- Bahar, Saafroedin, 1991, *Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Kehidupan Pertahanan Keamanan, Dalam Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa Dan Bernegara*, BP-7 Pusat
- ....., 1994, *Sumbangan Daerah Dalam Proses Nation Building*, Yogyakarta, Gadjah mada University Press
- Bogdan 7 Biklen, 1998, *Qualitative Research for Education: An Introduction To Theory and Methods*, Allyn and Bacon, Boston, London
- Chandra, C dan Yuliadhani, 2012, *Mendamaikan Multikulturalisme Dan Etnisitas: Peran Pendidikan Kewarganegaraan Melalui Pendekatan Multikultural dalam Sapriya Dkk, Transformasi Pilar Kebangsaan*, Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia
- Djohan, Djohermansyah, 1997, *Fenomena pemerintahan*, Jakarta, Yarsif Watampone.
- Esman, Milton, J, 1977, *Scottish Nationalism, North Sea Oil and The British Response*, Dalam Milton, J, Esman (ed), *Ethnic Conflict in the Western World*, Ithica, Cornell University Press
- ....., *Ethnic Politic and Economic Power*, Comparative Politics, No. 19, 345-418.

- Guba, E. G, 1978, *Toward a Methodology of Naturalistic Inquiry In Educational Evaluation (CSE Monograph Series In Evaluation No. 8) Los Angeles: Center for the Study of Evaluation.*
- Guba. E.G & Lincoln. Y.S, 1981, *Effective Evaluation: Improving the Usefulness of Evaluation Result Through Responsive and Naturalistic Approaches*, San Francisco : Jossey Bass..
- Haga B. J – 1981, *Lima Pohalaa, Susunan Masyarakat, Hukum Adat dan Kebijaksanaan Pemerintah di Gorontalo.* (Terjemahan KITLV LIPI). Jakarta Djambatan inkultura Fondation Inc
- Halking, 2012, *Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Untuk Pengembangan Pribadi Berkarakter Cerdas Dalam Mengatasi Fenomena Konflik Dan Kekerasan: Peran Pendidikan Kewarganegaraan, Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia*
- Harkrisnowo, Harkristuti, 2002, *Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Nasional Bidang Hukum Dan Hak Asasi Manusia*
- Kusumaatmadja, Mochtar, 1991, *Pancasila sebagai Ideologi Dalam Pergaulan Indonesia Dengan Dunia Internasional, Dalam Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa Dan Bernegara, BP-7 Pusat*
- Mamdani, M, 2001, *Beyond Settler And native As Identities*, Comparative Studies In Society And History.
- Miles dan Huberman, 1992, *Analisa Data Kualitatif*, Jakarta, UI Press
- Miskovic Maya, 2007, *The Construction Of Ethnic Identity of Balkan Muslim Immigrants: A Narrativization of Personal Experiences*, The Qualitative Report Volume 12
- Moerdiono, 1991, *Pancasila Sebagai Ideologi Sebuah Renungan Awal, Dalam Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa Dan Bernegara, BP-7 Pusat*
- ....., *Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka, Dalam Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa Dan Bernegara, BP-7 Pusat*
- Nasikun, 1996, *Pembangunan dan Dinamika Integrasi Nasional Dalam Masyarakat Majemuk, Dalam Ariel Heryanto, editor, Nasionalisme: Refleksi Krisis Kaum Ilmuawan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Nasution, S, 1992, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Tarsito Bandung

- Noor Syam Mohammad, 2000, *Penjabaran Filsafat Pancasila Dalam Filsafat Hukum*, Cet II Universitas Negeri Malang
- Oesman, Oetojo dan Alfian, 1991, *Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa Dan Bernegara*, BP-7 Pusat
- Poespowardojo, Soerjanto, 1991, *Pancasila Sebagai Ideologi Ditinjau Dari Segi Pandangan Hidup Bersama*, Dalam *Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa Dan Bernegara*, BP-7 Pusat
- Sastrapratedja, M, 1991, *Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Kehidupan Budaya, Dalam Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa Dan Bernegara*, BP-7 Pusat
- Savirani, Amalinda, 2003, *Multikulturalisme Dalam Politik Lokal* dalam Abdul Gaffar Karim, *Persoalan Otonomi daerah*, Pustaka Pelajar
- Soemardjan, Selo, 1991, *Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Kehidupan Politik, dalam Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa Dan Bernegara*, BP-7 Pusat
- Sutrisno, Muji, 2010, *Landasan Pembangunan Manusia Indonesia Dalam Perspektif Budaya*, Laboratorium Pancasila Universitas Negeri
- Taylor, Charles, 1994, *Multiculturalism: Examining The Politics of Recognition*, Princeton University Press
- Quinn Michael Patton, 2006, *Metode Evaluasi Kualitatif*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Wantu, Mustapa, Sastro, 1992, *Pola Rekrutmen Elit Politik Golkar Di Sulawesi Utara*, Thesis yang tidak dipublikasikan, Yogyakarta, Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada
- ....., 2008, *Perkembangan Politik Lokal: Studi Tentang Desentralisasi Dan Prospek Demokrasi Di Gorontalo*, Pernah diajukan sebagai Rancangan Usulan Proposal Disertasi pada Programm Doktor Ilmu Politik Universitas Gajah Mada
- ....., 2011, *Rekrutmen Pejabat Di Lingkungan Birokrasi Pemerintahan Daerah Dalam Perspektif Bureaucratic Politic*, Dalam Disertasi Program Administrasi Publik, Program Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang
- Weiner, Myron, 1982, *Modernisasi*, dalam Yahya Muhaimin dan Colin MacAndrews, *Masalah-Masalah Pembangunan Politik*, Gadjah Mada University Press

- ....., 1988, *Political integration and Political Development*, dalam  
Jl. Fingle dan R.W Gable , *Political Development and Social Change*,  
New York, John Wiley
- Wignjosoebroto, Soetandyo, 2010, *Paham nasionalisme Baru Untuk Indonesia*,  
Labortaorium Pancasila Universitas Negeri Malang
- Winatra , Udin Saripuddin, 2012, *Transformasi Nilai-Nilai Kebangsaan Untuk  
memperkokoh Jatidiri Bangsa Indonesia: Suatu Pendekatan  
Pendidikan Kewarganegaraan*, dalam Transformasi Pilar  
Kebangsaan Dalam Mengatasi Fenomena Konflik Dan  
Kekerasan: Peran Pendidikan Kewarganegaraan, Laboratorium  
Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia
- Wingarta, Putu Sastra, 2012, *Trasformasi Nilai-Nilai Kebangsaan Empat Pilar  
Kebangsaan Dalam Mengatasi Fenomena Konflik Dan  
Kekerasan: Peran PKn Perspektif Kewaspadaan Nasional* dalam  
Sapriya Dkk, Transformasi Pilar Kebangsaan, Laboratorium  
Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia
- Wiyono Suko, 2010, *Meneguhkan Negara Kesatuan Republik Indonesia  
Berdasarkan Pancasila*, Laboratorium Pancasila Universitas  
Negeri Malang

**LAMPIRAN:**

**RIWAYAT HIDUP**

**KETUA PENELITI**

- 1. Nama Peneliti** : **Dr. Udin Hamim, S.Pd.,SH M.Si**
- NIP : 19760814 200212 1 001
- Pekerjaan : Dosen UNG
- Pangkat/Gol : Penata/IIIc
- Alamat : JL. Jakarta. Bolk G. Nomor 2 Kel. Dulalowo Kota  
Selatan Kota Tengah, Kota Gorontalo
- Email : udinhamim@yahoo.co.id
- No. Hp : 081356167962
- 2. Riwayat Pendidikan**
- a. SDN 1 Mafutut Tahun 1990
  - b. SMP N 1 Soa Sio Tahun 1993
  - c. SMEA N Soa Sio Tahun 1996
  - d. Sarjana Pendidikan (S1) IKIP Negeri Gorontalo Tahun 2001
  - e. Pasca Sarjana (S2) Universitas Gadjah Mada (UGM) Jogjakarta Tahun 2006
  - f. Program Doktor (S3) Administrasi Publik/Kebijakan Publik, Kajian Politik Birokrasi, Brawijaya Malang Tahun 2010

### **3. Riwayat Penelitian Dan publikasi**

- a. Perilaku Memilih Etnis Gorontalo pada Pilkada Kota Tidore Kepulauan Tahun 2005
- b. Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Partai Politik Tahun 2005
- c. Representatif Birokrasi dalam Membangun Otonomi Daerah Tahun 2006
- d. Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah dalam Membangun Otonomi Daerah Tahun 2006.
- e. Pemetaan Konflik Etnis di Kabupaten Provinsi Gorontalo Tahun 2006.
- f. Strategi Pengembangan Sumber Daya Aparatur dalam Mewujudkan Good Local Governance Tahun 2008.
- g. Pengembangan Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah di Daerah Pemekeraan Tahun 2008.
- h. Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Sektor Publik Tahun 2010
- i. Model Pengembangan Sumber Daya Aparatur Dalam Perspektif *Capacity Building* Tahun 2011.

**Ketua Peneliti**

**Dr. Udin Hamim, S.Pd.,M.Si**  
**NIP. 19760814 200212 1 001**

## **ANGGOTA PENELITIAN**

**1. Nama Peneliti** : **Dr. Sastro M. Wantu, SH, M.Si**

NIP : 19660903 196603 1 001

Pekerjaan : Dosen UNG

Pangkat/Gol : Lektor Kepala/IVB

Alamat : JL. Selayar RT.2 RW.1 Kel. Liluwo,  
Kota Tengah, Kota Gorontalo

Email :

No. Hp : 081356167962

### **2. Riwayat Pendidikan**

- a. SDN Bua Batudaa Tahun 1981
- b. SMP Batudaa Tahun 1983
- c. SMAN 1 Kota Gorontalo Tahun 1986
- d. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Politik/  
Pemerintahan Unsrat Manado Tahun 1991
- e. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Sunan Giri Malang Tahun 2012
- f. Pasca Sarjana (S2) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Ilmu Politik  
Tahun 1994
- g. Program Doktor Administrasi Publik/Kebijakan Publik, Kajian Politik  
Birokrasi, Brawijaya Malang Tahun 2011



### **3. Riwayat Penelitian Dan publikasi**

- a. Pola Rekrutmen Elit Politik Golkar Di Sulawesi Utara Tahun 1999
- b. Sejarah Revolusi Islam Iran Tahun 2000
- c. Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo Tahun 1991
- d. Penyusunan RTRW Provinsi Gorontalo Tahun 2001
- e. Kemampuan Potensi Daerah Kabupaten Pohuwato Dalam Membangun Pelaksanaan Otonomi Daerah Tahun 2004
- f. Kajian Keberadaan Organisasi Dalam Penerapan Peraturan Pemerintah No. 8. Tahun 2003 Di Provinsi Gorontalo Tahun 2005
- g. Penyusunan Peta Konflik Di Provinsi Gorontalo Studi Kabupaten Pohuwato Tahun 2006
- h. Rekrutmen Pejabat Pemerintah Daerah Dalam Perspektif *Bureaucratic Politics*.

**Anggota Peneliti**

**Dr. Sastro M. Wantu, M.Si  
NIP. 19660903 196603 1 001**